



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

KOTA BIMA

NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bima Tahun 2018 berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Amggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 210);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bima Nomor 350)

1.2. Gambaran Umum Daerah

1.2.1. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kota Bima Secara geografis berada di bagian timur Pulau Sumbawa yang terletak antara 118° 41' 00" Bujur Timur - 118° 48' 00" Bujur Timur dan 8° 30' 00" Lintang Selatan - 8° 20' 00" Lintang Selatan. Adapun secara administratif Kota Bima berbatasan dengan wilayah-wilayah :

- Bagian Utara : Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima
- Bagian Timur : Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima
- Bagian Selatan : Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
- Bagian Barat : Teluk Bima

b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km² mencakup 5 (lima) kecamatan dan pada tahun 2017 mengalami pemekaran dari 38 (tiga puluh delapan) kelurahan menjadi 41 (empat puluh satu) kelurahan. Kecamatan Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 60,03 km² sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km². Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administratif Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
		Jumlah I	
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
		Jumlah II	
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
		Jumlah III	
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,60
		4. Kel. Kolo	26,49
		5. Kel. Jatibaru Timur	
		6. Kel. Ule	
		Jumlah IV	
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
		7. Kel. Nungga 8. Kel. Oi Mbo	11,59
Jumlah V			64.07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima

c. Topografi

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengn 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha.

Tabel 1.2. Luas Lahan (Ha) Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 %)	Bergelombang (2 - 15 %)	Curam (15 - 40 %)	Sangat Curam (> 40 %)
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
Jumlah		9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

Pada umumnya semua wilayah kecamatan Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengn lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 persen. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

1.2.2. Kondisi Demografis

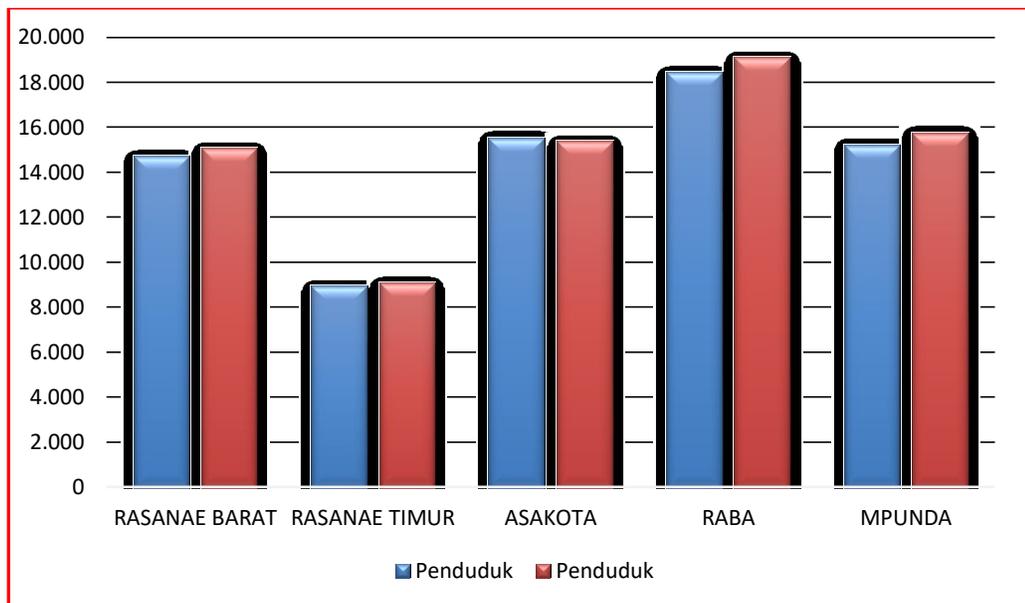
a. Jumlah Penduduk Kota Bima

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2018 mengalami peningkatan 2,15% dari 143.804 jiwa menjadi 146.959 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 72.722 jiwa dan perempuan 74. 237 jiwa. Jika dilihat menurut kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 37.502 jiwa, dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Timur sebesar 17.953 jiwa..

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	RASANA E BARAT	14.687	15.034	29.721
2	RASANA E TIMUR	8.902	9.051	17.953
3	ASAKOTA	15.512	15.343	30.855
4	RABA	18.423	19.079	37.502
5	MPUNDA	15.198	15.730	30.928
	Kota Bima	72.722	74.237	146.959

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2018)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Kecamatan Raba adalah kecamatan dengan jumlah penduduk yang terpadat, per 1 km² wilayahnya ditempati oleh 2.931,07 Jiwa. Sedangkan pada kecamatan Rasanae Timur setiap 1 km² wilayahnya hanya dihuni oleh 280,21 jiwa.

Tabel 1.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	RASANA E BARAT	29.721	10,14	2.931,07
2	RASANA E TIMUR	17.953	64,07	280,21
3	ASAKOTA	30.855	69,03	466,98
4	RABA	37.502	63,73	588,45
5	MPUNDA	30.928	15,28	2.024,08
	Kota Bima	146.959	222,25	661,2

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2018, data diolah)

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk yang berusia usia 30-34 tahun yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia yang lebih tua ataupun yang lebih muda.

Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	6.106	5.718	11.824
05-09	7.432	6.964	14.396
10-14	7.271	6.620	13.891
15-19	5.494	5.658	11.152
20-24	5.805	5.982	11.787
25-29	5.931	6.195	12.126
30-34	6.305	6.464	12.769
35-39	5.965	6.405	12.370
40-44	5.224	5.669	10.893
45-49	4.575	4.803	9.378
50-54	3.655	4.137	7.792
55-59	2.971	3.100	6.071
60-64	2.209	2.445	4.654
65-69	1.633	1.692	3.325
70-74	1.097	1.283	2.380
≥ 75	1.049	1.102	2.151
JUMLAH	72.049	73.352	145.374

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

c. Mata Pencaharian Penduduk/Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja di Kota Bima pada tahun 2018 mencapai 86.954 orang, yang terdiri dari 48.379 laki-laki dan 38.575 perempuan. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja sebanyak 33.224 jiwa yang

terdiri dari 9.766 laki-laki dan 23.458 perempuan. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 pada angka 67,02% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 72,35%. Untuk Tingkat Pengangguran mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2017 mencapai 10,15% sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 3,51%.

Selengkapnya jumlah penduduk menurut kegiatan utama di Kota Bima tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kegiatan Utama	2017		
	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	48.379	38.575	86.954
- Bekerja	46.364	37.541	83.905
- Pengangguran Terbuka	2.015	1.034	3.049
Bukan Angkatan Kerja	9.766	23.458	33.224
- Sekolah	5.068	5.289	10.357
- Mengurus Rumah Tangga	3.158	17.095	20.253
- Lainnya	1.540	1.074	2.614
Jumlah	58.145	62.033	120.178
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,2	62,18	72,35
Tingkat Pengangguran (%)	4,17	2,68	3,51

Sumber : BPS Kota Bima (Kota Bima Tahun 2018)

Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, ada 4 (empat) lapangan pekerjaan utama dengan prosentase terbesar yaitu :

- Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan : 30,57 %
- Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel : 21,83 %
- Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan : 13,47 %
- Industri Pengolahan : 9,55 %

Selengkapnya jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kota Bima tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2018

No	Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	Jumlah	%
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	7.643	3.660	11.303	13.47
2	Pertambangan dan Penggalian	3.224	1.921	5.145	6.13
3	Industri Pengolahan	3.651	4.364	8.015	9.55
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	496	207	703	0.83
5	B a n g u n a n	6.703	47	6.750	8.04
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	4.145	14.169	18.314	21.82
7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	4.563	272	4.835	5.76
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	2.501	685	3.186	3.79
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.438	12.216	25.654	30.57

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

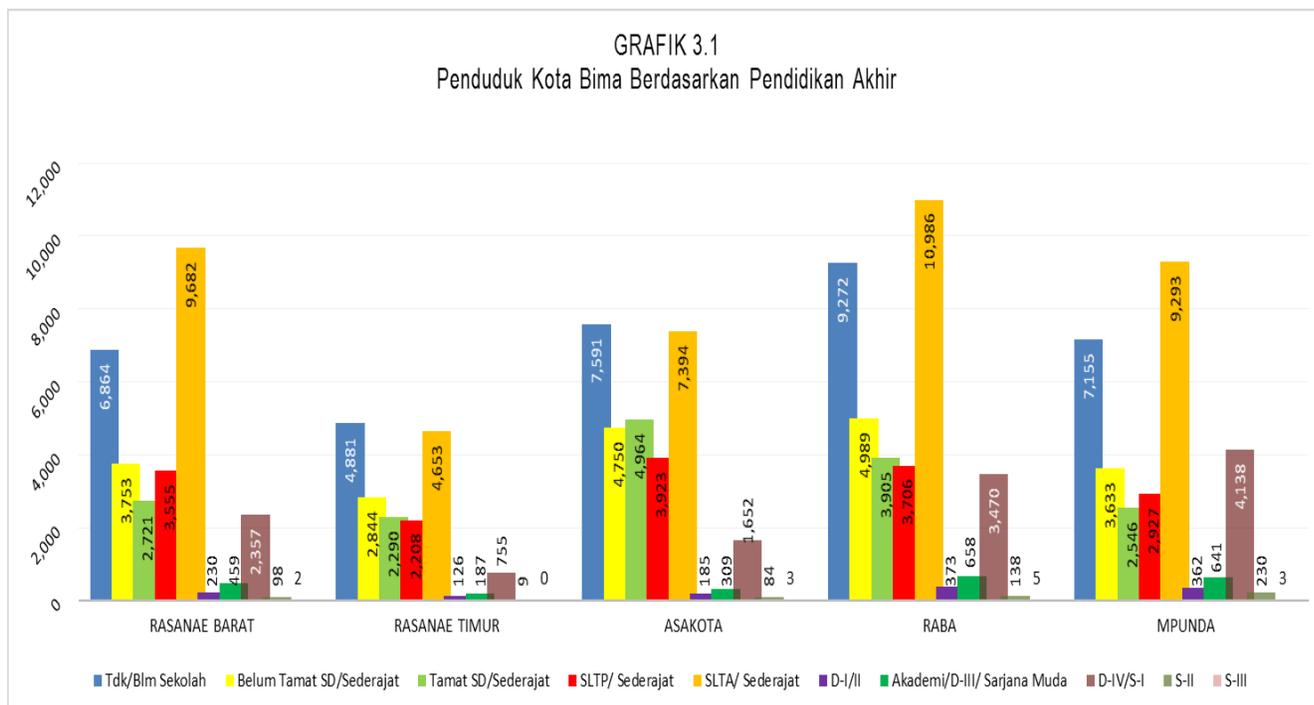
Jumlah penduduk di Kota Bima pada tahun 2018 jika dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat memiliki jumlah paling besar yaitu 42.008 orang atau 28,58%. Selengkapnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bima pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

KECAMATAN	Tdk/Blm Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D-I/II	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	D-IV/S-I	S-II	S-III	Jumlah
RASANA E BARAT	6.864	3.753	2.721	3.555	9.682	230	459	2.357	98	2	29.721
RASANA E TIMUR	4.881	2.844	2.290	2.208	4.653	126	187	755	9	0	17.953
ASAKOTA	7.591	4.750	4.964	3.923	7.394	185	309	1.652	84	3	30.855
RABA	9.272	4.989	3.905	3.706	10.986	373	658	3.470	138	5	37.502
MPUNDA	7.155	3.633	2.546	2.927	9.293	362	641	4.138	230	3	30.928
JUMLAH	35.763	19.969	16.426	16.319	42.008	1.276	2.254	12.372	559	13	146.959

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

GRAFIK 3.1
Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Akhir



1.2.3. Kondisi Perekonomian

1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah

a. Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Bima serta masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Namun, seiring dengan makin berkembangnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan wilayah, alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif terutama di kawasan pusat kota menjadi kawasan permukiman baru pun tidak terhindarkan. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Sebagai lahan untuk bercocok tanam komoditas pertanian, lahan sawah terbagi menjadi sawah dengan irigasi teknis, dengan luas 2.073 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 349 ha. Lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Rasanæ Timur dan di Kecamatan Raba. Dua kecamatan ini pun memiliki jaringan irigasi teknis yang memadai dibanding dengan kecamatan yang lain.

Tabel 1.9. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Bima Tahun 2018

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					
	Rasanae Barat	Mpunda	Rasanae Timur	Raba	Asakota	Kota Bima
1. Irigasi Teknis	5	309	804	659	257	2.073
2. Tadah Hujan	-	-	269	50	30	349
3. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
Total Tahun 2017	5	309	1.112	709	287	2.422
Total Tahun 2015	3	318	957	713	276	2.267
Total Tahun 2014	3	320	967	705	276	2.271
Total Tahun 2013	3	321	968	706	246	2.244

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Tabel 1.10. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2017

Jenis Data	Komoditas							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi kayu	Ubi Jalar
1. Luas Panen (Ha)	5 103	1 841	2 065	934	62	294	97	2
2. Produksi (Ton)	28 260	6 005	15 515	1 233	71	336	2 031	26
3. Produktivitas (Kw/Ha)	55,38	32,62	75,13	13,20	11,45	11,42	209,38	130,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

Luas panen padi sawah di Kota Bima tahun 2018 seluas 5.103 Ha dengan produksi gabah sebesar 28.260 ton. Total luas panen tanaman jagung pada tahun 2018 adalah seluas 1.217 Ha. Hasil produksi komoditas jagung cukup tinggi di banding komoditas lain yang besarnya mencapai 15.515 ton.

b. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Jenis sarana perdagangan di Kota Bima pada tahun 2013

meliputi: 6 unit pasar umum, 457 unit toko, 481 unit kios/warung, 51 unit rumah makan.

Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, pada tahun 2013 tercatat 2.409 perusahaan perdagangan yang ada di Kota Bima, dengan rincian 57 perusahaan perdagangan besar, 171 perusahaan perdagangan menengah, dan 2.181 perusahaan perdagangan kecil. Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

c. Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima meliputi wisata budaya dan wisata alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana saat ini masih terbatas pada wisatawan lokal. Jika dilihat secara geografis, posisi Kota Bima berada di antara dua kawasan yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Sehingga secara geografis Kota Bima sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya mengingat letak wilayah yang cukup strategis. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Bima secara sekilas dapat diuraikan sebagai berikut.

- **Istana Kayu Asi Bou**

Istana ini terletak di samping timur Istana Bima (sekarang Museum Asi Mbojo). Dinamakan Asi Bou karena didirikan setelah pendirian Istana Bima pada tahun 1927, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1936). Asi Bou dibangun oleh untuk Putera Mahkota Muhammad Salahuddin.

- **Masjid Muhammad Salahuddin**

Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah dengan Wajir Ismail pada tahun 1737. Masjid ini terletak di Kampung Sigi atau di sebelah selatan lapangan Sera Suba (Jalan Soekarno Hatta).

- **Museum Asi Mbojo**

Museum Asi Mbojo dulunya merupakan Istana bagi Raja dan Sultan Bima. Museum ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr. Obzicshteer Rehata. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah diakses. Di Museum ini terdapat silsilah/tata urutan Raja dan Kesultanan Bima, benda tata urutan kepangkatan pemerintahan, barang-barang serta pakain adat yang digunakan Istana Kerajaan, para prajurit serta masyarakat pada jaman itu. Selain

itu juga dipamerkan benda-benda yang tidak hanya berasal dari jaman kerajaan dan kesultanan, tetapi juga benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan kesultanan Bima.

- **Museum Samparaja**

Museum Samparaja merupakan museum yang ada di Kota Bima selain Museum Asi Mbojo. Museum ini terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Moggonao Kota Bima. Koleksi yang ada di museum ini antara lain Kitab BO yang asli, kitab yang membahas ihwal Kerajaan Bima pada abad 14 Masehi. Selain itu terdapat benda-benda peninggalan kesultanan Bima.

- **Pantai Ni'u**

Pantai Ni'u berada di sisi timur Teluk Bima, di jalan lintas Bima-Sumbawa sekitar 3,5 km dari terminal Dara Kota Bima. Lokasinya yang berada di tepi jalan nasional ini menjadikan pantai ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Obyek wisata ini cukup ramai dikunjungi wisatawan lokal, terutama pada hari-hari libur. Di kawasan ini terdapat gazebo-gazebo yang dibangun Pemerintah Kota Bima dan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati panorama pantai kawasan ini.

- **Pantai Lawata**

Pantai Lawata merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama bagi masyarakat Kota Bima. Di kawasan pantai ini pengunjung dapat menikmati gai beryang tersedia dan melakukan aktifitas seperti berenang.

- **Pantai Amahami**

Pantai Amahami juga merupakan tempat tujuan bagi masyarakat Kota Bima untuk berwisata. Kawasan pantai ini ramai terutama pada sore dan malam hari, dengan berbagai aktifitas yang ada seperti pedagang kaki lima. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Lawata atau berada sebelum Pantai Lawata dari arah Terminal Dara. Selain pantai-pantai tersebut, di kawasan pesisir Teluk Bima masih terdapat obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Kolo dan Pantai So Ati.

- **Pantai Kolo**

Selain Pantai Amahami, Pantai Lawata, Pantai Ni'u dan Pantai Ule, terdapat sebuah pantai lain yang tidak kalah eksotik, yaitu Pantai Kolo. Pantai ini terletak di kawasan Perairan Kolo. Kapal-kapal laut yang hendak menuju Pelabuhan Bima harus melalui Perairan Kolo yang merupakan satu-satunya pintu masuk menuju pelabuhan Bima. Selain ramai dikunjungi para pelancong, pantai ini juga menawarkan panorama dan keindahan yang memang layak diancungin jempol. Dukungan akses jalan menuju kawasan wisata ini pun dapat dikatakan

cukup memadai. Namun demikian, manajemen pengelolaannya harus ditata dengan lebih profesional agar di masa-masa yang akan datang potensi kawasan wisata ini dapat tergali secara lebih optimal.

Sebagai pendukung pariwisata, terdapat hotel, losmen dan *homestay* yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Bima. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 18 unit, dengan jumlah kamar yang ada sebanyak 427 kamar dan tempat tidur sebanyak 649 buah.

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,60 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 2,75 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,76 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 3,30 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,14 persen (angka ini meningkat dari 22,57 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,54 persen (turun dari 14,63 persen di tahun 2013),

disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,19 persen (turun dari 12,23 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,18 persen (turun dari 10,29 persen di tahun 2013) dan Konstruksi sebesar 9,07 persen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya kategori Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 1.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 - 2017

Kategori	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%								
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	336.300,89	15,44	375.446,07	14,06	419 103,64	14,00	456 132,74	13,82	493 346,96	13,54
B Pertambangan dan Penggalian	8.954,16	0,41	10 339,67	0,39	11 602,50	0,39	12 360,28	0,37	14 097,66	0,39
C Industri Pengolahan	80.022,40	3,67	84 973,46	3,18	92 352,46	3,08	102 837,40	3,12	110 814,31	3,04
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.023,22	0,18	4 453,68	0,17	4 806,06	0,16	6 189,54	0,19	6 715,10	0,18
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	812,44	0,04	1.062,74	0,04	1 133,97	0,04	1 238,97	0,04	1 348,72	0,04
F Konstruksi	206.177,73	9,47	232 528,23	8,71	262 620,58	8,77	292 775,06	8,87	330 481,46	9,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483.862,68	22,22	611 022,81	22,88	690 154,42	23,05	776 810,06	23,53	879 770,47	24,14
H Transportasi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	233.209,92	10,71	271 700,05	10,17	304 326,98	10,16	334 801,01	10,14	371 197,84	10,18
I Informasi dan Komunikasi	53.703,74	2,47	79 856,60	2,99	91 206,42	3,05	102 539,52	3,11	113 992,69	3,13
J Jasa Keuangan dan Asuransi	38.284,13	1,76	44 737,74	1,57	44 737,74	1,49	49 111,33	1,49	55 619,45	1,53
K Real Estate	50.203,07	2,31	62 .667,71	2,35	68 924,34	2,30	76 959,25	2,33	88.943,55	2,44
L Jasa Perusahaan	109.062,67	5,01	146 189,59	5,47	163 474,41	5,46	179 414,50	5,44	195 907,11	5,38
M Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.585,39	0,35	9 669,24	0,36	10 675,67	0,36	11 676,75	0,35	12 829,34	0,35
N Jasa Pendidikan	241.203,93	11,08	348 307,37	13,04	395 400,82	13,21	419 257,39	12,70	444 130,76	12,19
O Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167.086,93	7,67	210 690,68	7,89	233 738,97	7,81	260 148,87	7,88	284 562,99	7,81
P Jasa lainnya	75.729,13	3,48	86 765,99	3,25	94 918,44	3,17	103 274,42	3,13	111 597,54	3,06
Q	81.321,41	3,73	93 521,26	3,50	104 950,21	3,51	115 182,20	3,49	129 372,78	3,55
PDRB	2.177.543,21	100	2.671 111,92	100	2.994.127,63	100	3.300.709,27	100	3.644.728,72	100

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Tabel 1.12. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2013 – 2017

Kategori	2014		2015		2016		2017	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	348 728,89	3,70	362 720,26	4,01	369 630,11	1,91	386 436,04	4,55
B Pertambangan dan	9 541,55	6,36	10 247,07	7,39	10 883,88	6,21	11 738,27	7,85
C Industri Pengolahan	83 091,96	3,84	86 266,01	3,82	91 305,57	5,84	96 369,39	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	5 624,75	39,81	5 329,26	-5,25	6 253,89	17,35	6 472,08	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	839,68	3,35	860,19	2,44	899,57	4,58	949,13	5,51
F Konstruksi	219 580,18	6,50	234 125,70	6,62	253 666,65	8,35	278 060,28	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	519 259,27	7,32	556 890,99	7,25	601 525,03	8,01	652 960,52	8,55
H Transportasi dan Pergudangan	246 169,98	5,56	260 644,79	5,88	274 880,23	5,46	295 740,54	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57 118,64	6,36	60 993,37	6,78	65 947,50	8,12	70 367,02	6,70
J Informasi dan Komunikasi	40 903,95	6,84	43 826,09	7,14	47 570,24	8,54	51 356,84	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	53 276,78	6,12	56 675,02	6,38	60 744,13	7,18	66 562,90	9,58
L Real Estate	115 390,71	5,80	122 808,55	6,43	129 988,46	5,85	137 575,22	5,84
M,N Jasa Perusahaan	8 106,89	6,87	8 524,27	5,15	8 979,99	5,35	9 489,15	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253 082,08	4,92	262 778,38	3,83	269 722,21	2,64	277 004,71	2,70
P Jasa Pendidikan	177 858,43	4,55	189 031,70	6,45	200 136,14	6,28	212 677,87	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kgt Sosial	79 558,07	5,06	83 773,40	5,30	88 707,45	5,89	93 622,10	5,54
R,S,T,U Jasa lainnya	87 701,70	7,85	92 992,43	6,03	99 127,45	6,60	107 008,09	7,95
PDRB	2 305 833,52	5,89	2 438 487,46	5,75	2 579 968,51	5,80	2 754 399,26	6,76

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2010,

mencapai 2,75 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,58 trilyun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan Sukarno Hatta dan perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang yang melanda Kota Bima pada akhir bulan Desember 2016. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sembilan persen tersebut antara lain: lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,62 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,58 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,55 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,95 persen, lapangan usaha Jasa Pertambangan dan Pengalihan sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 7,59 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,70 persen, Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah Lapangan usaha Real Estat sebesar 5,84 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 5,67 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,55 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,54 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,51 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,55 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas 3,49 persen, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,70 persen.

Tabel 1.13. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017

Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan	1,94	3,70	4,01	1,91	4,55
B Pertambangan dan Penggalian	(5,10)	6,36	7,39	6,21	7,85
C Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	39,81	-5,25	17,35	3,49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
F Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
H Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,56	5,88	5,46	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
J Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	6,12	6,38	7,18	9,58
L Real Estate	6,00	5,80	6,43	5,85	5,84
M,N Jasa Perusahaan	4,89	6,87	5,15	5,35	5,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,36	4,92	3,83	2,64	2,70
P Jasa Pendidikan	4,55	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,38	5,06	5,30	5,89	5,54
R,S, Jasa lainnya	7,54	7,85	6,03	6,60	7,95
PDRB	5,58	5,89	5,75	5,80	6,76

2. Sumber : BPS Kota Bima, 2018

3. *) Angka Sementara ; **) Angka Sangat Sementara

b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 21,90 juta

rupiah (lihat tabel 11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 1.14. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2013-2017

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2013	2014	2015	2016	2017
- ADHB	2.374	2.671	2.994	3.301	3.645
- ADHK	2.178	2.306	2.438	2.580	2.754
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	15.504	17.079	18.744	20.237	21.902
- ADHK	14.233	14.743	15.266	15.818	16.552
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/	3,30	3,66	3,54	3,62	4,64
Jumlah Penduduk (ribu orang)	153,1	156,4	159,7	163,1	166,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,20	2,15	2,13	2,11	2,03

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

c. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Selama periode 2013-2017 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2013-2017 yaitu di tahun 2016 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2017.

4.

Tabel 1.15. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kota Bima

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bima	10,06	7,16	4,29	3,10	4,04

Sumber : BPS Kota Bima, 2018

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013 - 2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028. Oleh karena itu perlu perhatian yang tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam visi misi Walikota/Wakil Walikota Bima yang terpilih.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang ada, maka visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah: **“TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut:

- a. Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.
- b. Beriman memiliki makna masyarakat Kota Bima yang selalu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun karakter pelaku pembangunan yang religius. SDM yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kota Bima. Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif yang religius untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam melestarikan

nilai-nilai budaya lokal. Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat Kota Bima yang bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

- c. Maju memiliki makna kualitas sumber daya manusia yang baik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kota Bima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Disamping itu, Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima dimasa yang akan datang. Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar.
- d. Adil memiliki makna bahwa Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, pentingnya juga menekankan agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Bima terutama membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik

serta berkembangnya wilayah-wilayah terisolir dan terpencil menjadi lebih terbuk dengan tersedianya infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

- e. Sejahtera memiliki makna masyarakat Kota Bima memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kerawanan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Memperhatikan visi tersebut di atas, serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Bima dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

2.1.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013-2018, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Bima dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima yang beriman, maju, adil dan sejahtera tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Bima dalam rangka pencapaian visi Kota Bima 2013 – 2018 sebagai kota perdagangan yang mengandung arti dimana kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan, serta sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang.

Membangun kota perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Bima sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Bima.

Misi Pertama : “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berlandaskan iman merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan kota bima yang “**berteman**”. Landasan moral dan etika manusia yang terbentuk tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif yang religius untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Nilai religius sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat kota bima yang bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Program bima berzakat dan maghrib mengaji dalam rangka membumikan al qur'an sehingga terbentuk karakter komunitas yang Qur'ani, ditunjukkan oleh sikap sebagai penyebar salam perdamaian, penyambung silaturahmi, penyantun yang lemah, pengucap yang sejuuk, dan pengasah kecerdasan spiritual.

Wujud dari nilai-nilai religius ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada lembaga dan kegiatan keagamaan seperti MTQ tingkat kelurahan sampai nasional. Beberapa kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan seni baca Al-Qur'an, juga mendatangkan qori dan qori'ah internasional. Indikator keberhasilannya adalah Kota Bima memiliki qori dan qori'ah yang meraih juara di tingkat propinsi dan tingkat nasional.

Upaya peningkatan dan dukungan ini terus dilaksanakan pemerintah Kota Bima, seperti pembangunan rumah ibadah umat beragama, masjid, mushalla dan TPQ sebagai sarana peningkatan dan penguatan nilai-nilai religius masyarakat, insentif bagi petugas agama, imam masjid, marbot/bilal, guru ngaji yang memegang peranan penting dalam membentuk ketahanan aqidah ummat.

Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

Misi Kedua : “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.

Dalam rangka mencapai tujuan misi tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman. Masyarakat Kota Bima harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kota Bima pada masa yang akan datang.

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, dan masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar.

Pemerintah Kota Bima dalam hal ini terus melakukan terobosan sebagai upaya penciptaan masyarakat Kota Bima yang “MAJU” seperti : pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi yang memungkinkan warga miskin dan berprestasi mendapat peluang sampai tingkat pendidikan tinggi, program wajib belajar 12 tahun dengan program aksi bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMU, SMK, dan sederajat. Sektor kesehatan juga tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima, antara lain : program aksi bebas biaya kesehatan dasar, persalinan dan uang jaminan perawatan di rumah sakit, pembangunan rumah sakit type D untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya ambulance, santunan kematian dan pemakaman.

Misi Ketiga : “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.

Misi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Pelayanan pemerintahan yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi Keempat : “Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan layanan bisnis dan investasi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang berdaya saing.

Daya dukung berupa bantuan modal dan teknologi serta ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah dengan cara pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat serta dengan meningkatkan peran maupun aspirasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah berupa penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai kebutuhan ataupun peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat.

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bima 2013 - 2018

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN
VISI : TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"		
1) Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya local.	1 Mewujudkan . kehidupan sosial masyarakat yang religious	a. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati.
		b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.
		c. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba
	2 Meningkatkan citra . daerah dan menjamin keberlangsungan kearifan lokal	a. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.
2) Menciptakan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki	1 Menciptakan manusia . yang memiliki daya saing dan menguasai teknologi.	b. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal
		a. Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual</p>		b. Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompeten
		c. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca
		d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing
	2 Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.	a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
		b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan yang merata dan berkualitas
		c. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sehat
<p>3) Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.</p>	1 Mengurangi kesenjangan antar manusia dan antar kawasan/wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat	a. Terwujudnya perencanaan dan pelayanan sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan wilayah.
	b. Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai.	
	2 Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel	a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	b. Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	
	c. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.	
	d. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif	
	e. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan transparan	
	f. Terwujudnya pengawasan yang professional	
	g. Tersedianya data dan layanan informasi	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN
		daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi h. Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas i. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah
4) Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan	1 Mengoptimalkan . potensi ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai 2 Menjamin . ketersediaan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas tenaga kerja 3 Meningkatkan pangsa . pasar produksi unggulan lokal 4 Meningkatkan . ketahanan masyarakat dan daya	a. Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas b. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai c. Tersedianya pelaku usaha yang professional d. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas e. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang f. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan g. Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota Adipura h. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata. i. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services). Terbukanya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja a. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas. b. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah a. Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN
	dukung lingkungan	b. Tereksplotasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang c. Terlindunginya kawasan sumber mata air d. Tersedianya SOP penanggulangan bencana e. Terciptanya stabilitas daerah f. Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

2.2.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan jangka menengah tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. Adapun strategi pembangunan Kota Bima untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah tersebut diatas adalah antara lain:

- Strategi pembangunan dalam rangka membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat

membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, akan mencakup:

1. Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba
 2. Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.
 3. Fasilitasi dan promosi adat budaya
- Strategi dalam rangka mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual, meliputi:
1. Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan.
 2. Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan
 3. Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja.
 4. Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan.
 5. Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan.
- Strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, meliputi :
1. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial
 2. Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.
 3. Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah
 4. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai
 5. Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan
 6. Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset
 7. Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.
 8. Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT
- Strategi pembangunan dalam rangka menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, meliputi:

1. Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota
2. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana
3. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal
4. Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha
5. Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih
6. Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang
7. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh
8. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sanitiasi dan persampahan
9. Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata
10. Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu
11. Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan.
12. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi
13. Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah
14. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai
15. Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan
16. Inventarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air
17. Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana
18. Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.
19. Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik

2.2.2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran selama 5 tahun kedepan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Bima masih menitik beratkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata dan seimbang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya Fokus Strategi Daerah yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bima tetap memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (RPJMD Provinsi) serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan kearifan lokal masyarakat Kota Bima.

Dengan demikian arah kebijakan umum pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018 meliputi:

- **Misi 1:** *Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, dengan arah kebijakan:*
 1. Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis
 2. Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan
 3. Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit social
 4. Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya
 5. Pameran dan festival budaya
- **Misi 2:** *Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual:*
 1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas
 2. Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan

3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat
 4. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan.
 5. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
 6. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
 7. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 8. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana
 9. Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian
 10. Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular
 11. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS.
 12. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan
- Misi 3: *Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, dengan arah kebijakan:*
1. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas.
 2. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas
 3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
 4. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
 5. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan daerah
 6. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan public
 7. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
 8. Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional
 9. Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah
 10. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen asset
 11. Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR
 12. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT

13. Pengembangan metode pendataan kependudukan

14. Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku

- Misi 4: *Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, dengan arah kebijakan:*

1. Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi.
2. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima
3. Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM
4. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya
5. Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan
7. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
8. Penertiban bangunan tanpa ijin
9. Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa
10. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir
11. Pengembangan sistem pengelolaan sampah
12. Pengembangan daya tarik obyek wisata
13. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
14. Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran
15. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan
16. Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat
17. Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai
18. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA
19. Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air
20. Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana
21. Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik

22. Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas

Secara lebih rinci, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bima periode tahun 2013-2018 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bima Tahun 2013 – 2018

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.			
1. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang religius	a. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati.	Fasilitasi, Sosialisasi, Mediasi dan Koordinasi	Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis.
	b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.	Edukasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi	Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan.
	c. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba	Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit sosial lainnya.
2. Meningkatkan citra daerah dan menjamin keberlangsungan kearifan lokal	a. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.	Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.	Pemberdayaan sanggar seni dan Organisasi budaya
	b. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal	Fasilitasi dan promosi adat budaya	Pameran dan festival budaya
Misi 2 : Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan manusia yang memiliki daya saing dan menguasai teknologi.	a. Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas.	Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan.	Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas
	b. Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompeten.	Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan.	Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan
	c. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca.	Fasilitasi dan sosialisasi.	Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat
	d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing.	Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja.	a. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan. b. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.	a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan.	a. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
			b. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
			c. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana
	b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan yang merata dan berkualitas.	Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan.	Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian.
	c. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sehat	Fasilitasi dan mobilisasi	a. Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular.
			b. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS.
		c. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan.	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 3 :				
Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.				
1. Mengurangi kesenjangan antar manusia dan antar kawasan/wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat	a. Terwujudnya perencanaan dan pelayanan sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan wilayah.	1. Koordinasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Konsultasi	Sinergi kegiatan pembangunan sosial kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	
		2. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial .	a. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas. b. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas	
	b. Tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai.	Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.	a. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.	a. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
			b. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	b. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
2. Mewujudkan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel	a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah	a. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah b. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan publik	
	b. Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Koordinasi, konsultasi, legislasi dan Sosialisasi	Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	
	c. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai	Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	d. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif	Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan Konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan.	Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah
	e. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan transparan	Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset	Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen asset
	f. Terwujudnya pengawasan yang professional	Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.	Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR
	g. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT	Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT
	h. Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas	Fasilitasi E-KTP	Pengembangan metode pendataan kependudukan
	i. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah	Sosialisasi/ Inventarisasi / Fasilitasi / Duplikasi	Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku

Misi 4 :

Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mengoptimalkan potensi ekonomi domestik dalam upaya memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan	a. Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas	Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pengembangan perencanaan Ekonomi yang partisipatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kewirausahaan, penataan kelembangan dan investasi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.	b. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai	1. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana	Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi.
		2. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal	Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima
	c. Tersedianya pelaku usaha yang professional	Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha	Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM
	d. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas	Koordinasi/Fasilitasi/ Konsultasi yang diarahkan padasinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan SDA kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pengembangan perencanaan infrastruktur dan SDA yang partisipatif
	e. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang	Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih	a. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya
			b. Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut
			c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan
	f. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan	Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	a. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
			b. Penertiban bangunan tanpa ijin
	g. Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota Adipura	1. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh	a. Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa
			b. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir
		2. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sampah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	h. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata.	Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata	Pengembangan daya tarik obyek wisata
	i. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services).	Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu	Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
2. Menjamin ketersediaan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas tenaga kerja.	Terbukanya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan.	Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran
3. Meningkatkan pangsa pasar produksi unggulan lokal	a. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas.	Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan
	b. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah	Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah	Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat
4. Meningkatkan ketahanan masyarakat dan daya dukung lingkungan	a. Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai	Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai	Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai
	b. Tereksplotasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang	Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan	Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA
	c. Terlindunginya kawasan sumber mata air	Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air	Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air
	d. Tersedianya SOP penanggulangan bencana	Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana	Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	e. Terciptanya stabilitas daerah	Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.	Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik
	f. Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab	Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik	Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas

2.3. Prioritas Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bima menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagaimana di tuangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Bima Tahun 2013-2018

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
VISI : Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera								
Misi 1 :								
Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal								
a. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, toleransi dan saling hormat menghormati.	Fasilitasi, Sosialisasi, Mediasi dan Koordinasi	Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis	Konflik yang berlatar belakang SARA	7 Kasus	2 Kasus	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbang
b. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, bermental spiritual dan religius.	Edukasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi	Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai, ulama dan petugas keagamaan	Cakupan bantuan untuk lembaga keagamaan dan petugas keagamaan	80%	100%	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETDA (Bag. Kesra); DPPKAD; Kecamatan; Kelurahan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
c. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba	Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit sosial lainnya	Penyakit sosial masyarakat yang ditangani (NAPZA, Judi dan WTS)	10,32	3,03	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbanglin mas; SatPol PP; BPPKB
d. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.	Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.	Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya	Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk	0,14	1,52	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
e. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal	Fasilitasi dan promosi adat budaya	Pameran dan festival budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali setahun	2 kali setahun	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 2 :								
Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual								
a. Terwujudnya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau dengan	Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi penyusunan rencana induk	Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana prasarana	Penduduk yang berusia >15 Tahun tidak melek huruf (buta aksara)	1,14%	0,94%	Program Pendidikan Non Formal	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
dukungan sarana prasarana pelayanan pendidikan yang berkualitas	pengembangan pendidikan	pendidikan yang berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	79,32%	91,31%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pendidikan	Dikpora
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) per 1.000 Penduduk jenjang Dikdas	908,27	943,07	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pendidikan	Dikpora
			Angka partisipasi sekolah (APS) per 1.000 jenjang Pendidikan Menengah	900,34	922,18	Program Pendidikan Menengah	Urusan Wajib Pendidikan	Dikpora
			Rata-rata lama sekolah	10,22 Thn	12 Thn	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pendidikan	Dikpora
b Terwujudnya tenaga pendidikan yang memadai dan berkompoten	Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional pendidikan	Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,93%	95,93%	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Urusan Wajib Pendidikan	Dikpora

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
c. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca	Fasilitasi dan sosialisasi	Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang ditangani	2 TBM	12 TBM	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Urusan Wajib Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
d. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing	Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan dan latihan kerja	a. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kegiatan olahraga dan kepemudaan	11	18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora
		b. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.	Tingkat pengangguran terbuka	6,36%	3,80%	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	Disosnakertrans
e. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan	a. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas,	Angka usia harapan hidup	63,70 Tahun	67,17 Tahun	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan kesehatan	62%	90%			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		merata dan terjangkau	dasar masyarakat miskin					
			Presentase Balita Gizi Buruk	0,22%	0,01%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB)	9,27 / 1.000 KH	0,59 / 1.000 KH	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu (AKI)	198,7 / 100.000 KH	75 / 100.000 KH			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,91%	92,00%			
		b. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Penerima kartu jaminan kesehatan seperti: jamkesmas, jamkesda, jampersal (BPJS)	75,00%	100,00%	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		c. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	84,44%	99,69%	Program Keluarga Berencana	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKB
f. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan	Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	Ketersediaan Rumah sakit type D	Tidak Ada	Ada	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10.000 penduduk	1,64	1,46	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu Dan Jaringannya.	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
g. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sehat	Fasilitasi dan mobilisasi	a. Pengendalian penyebaran penyakit	Cakupan Desa/kelurahan Universal	89,47%	100%	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		menular dan tidak menular	Child Immunization (UCI)					
		b. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS	% Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	54,50%	58,50%	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
		c. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan	Cakupan Jamban Keluarga	58,00%	83,00%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
Misi 3 :								
Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima.								
a. Terwujudnya perencanaan dan pelayanan sosial yang bermutu, merata antar masyarakat dan	1. Koordinasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Konsultasi Perencanaan sosial	Sinergi kegiatan pembangunan sosial kewenangan pusat, provinsi dan	Angka IPM	69,83	74,83	Program perencanaan sosial budaya	Urusan Wajib Perencanaan Daerah	Bappeda

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
wilayah.		kabupaten/kota						
	2. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial .	a. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	7,97%	18,68%	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Urusan Wajib Sosial	Dinsosnakertrans
		b. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	14,00%	28,18%	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Urusan Wajib Sosial	Dinsosnakertrans
b. Tercapainya kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup yang memadai.	Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender	a. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya pemberdaya	Angka kemiskinan	12,35%	7,45%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPK; 38 Kelurahan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		an masyarakat yang berkelanjutan.						
		b. Peningkatan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,56	0,35	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
c. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah	Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah	a. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah	Dokumen SPM, dokumen SOP, Informasi alur pelayanan publik	Tidak Ada	Ada	Program pembinaan dan peningkatan pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETDA
		b. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan publik	Tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik	55,00%	85,00%			

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
d. Tersedianya aturan hukum yang efektif dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Koordinasi, konsultasi, legislasi dan Sosialisasi	Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Cakupan Produk Hukum yang di sosialisasikan	100%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETDA
e. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai	Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional	Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjelesaian struktural	998 PNS	1.671 PNS	Program Pendidikan Kedinasan		BKD
f. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipatif	Koordinasi/Regulasi / Sosialisasi/ fasilitasi dan Konsultasi yang diarahkan pada program/kegiatan pembangunan.	Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif perencanaan pembangunan daerah	Dokumen RPJPD dan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Program perencanaan pembangunan daerah	Urusan Wajib Perencanaan Daerah	Bappeda
			Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERWALI	Ada	Ada			
g. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang tertib,	Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan	Peningkatan penatausahaan pendapatan dan	Peingkatan Opini Pengelolaan	WDP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan	DPPKAD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
akuntabel dan transparan	manajemen asset	belanja daerah serta manajemen asset	Keuangan dari BPK Pertumbuhan PAD	21,76%	31,24%	Pengelolaan Keuangan Daerah	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Inspektorat
h. Terwujudnya pengawasan yang professional	Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.	Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR	Jumlah temuan auditor yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	70%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
i. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT	Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT	Ketersediaan Website	Ada	Aktif	Program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	SETDA (Bag. Humas); Bappeda
j. Tertatanya administrasi kependudukan yang berkualitas	Fasilitasi E-KTP	Pengembangan metode pendataan kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	69,93%	72,93%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
k. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah	Sosialisasi/ Inventarisasi / Fasilitasi / Duplikasi	Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku	SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	16,67%	100,00%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Urusan Wajib Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Misi 4 :								
Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasis pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan								
a. Terwujudnya rencana pembangunan bidang Ekonomi yang berkualitas	Koordinasi/Sosialisasi/fasilitasi/Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pengembangan perencanaan Ekonomi yang partisipatif	Pertumbuhan Ekonomi	5,82%	7,02%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Urusan Wajib Perencanaan Daerah	Bappeda
			Laju inflasi	3,61%	2,96%			
			PDRB perkapita ADHK	Rp. 3,51 Juta/Jiwa	Rp. 4,25 Juta/Jiwa			
b. Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai	1. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan prasarana	Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi.	Pasar tradisional modern	Tidak tersedia	Tersedia	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Pilihan Perdagangan	Diskoperindag
	2. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki	Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki	Cakupan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	232 orang	1450 orang	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan	Urusan Pilihan Perdagangan	Diskoperindag

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	lima /usaha informal	lima	yang ditangani			Asongan		
c. Tersedianya pelaku usaha yang professional	Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha	Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM	UMKM yang mendapat bantuan modal	5,34%	21,52%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag; SETDA (Bag. Ekonomi)
d. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan SDA yang berkualitas	Koordinasi/Sosialisasi/fasilitasi/Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan SDA kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pengembangan perencanaan infrastruktur dan SDA yang partisipatif	Master plan infrastruktur skala kawasan dan skala kota	10%	75%	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Urusan Wajib Perencanaan Daerah	Bappeda
e. Tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang merata dan seimbang	Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih	a. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	41,79%	51,64%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU dan Tamben
		b. Pengembangan dan revitalisasi	Ketersediaan Terminal AKAP type A	0%	100%	Program Pembangunan Sarana dan	Perhubungan	Dishubkominfo

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		terminal dan pelabuhan laut				Prasarana Perhubungan		
		c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan	Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih	78,51%	86,21%	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU dan Tamben
			Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)	69,05%	77,89%	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas PU dan Tamben
f. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan kawasan	Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	a. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Dokumen RDTRK	1 Dok	5 Dok	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota dan perumahan
		b. Penertiban bangunan tanpa ijin	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,97	1,08	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota dan perumahan
g. Terwujudnya Wilayah Kota Sebagai Kota	1. Revitalisasi pasar, kawasan pertokoan,	a. Penataan dan revitalisasi kawasan	Dokumen RTBL	Tidak ada	Ada	Program perencanaan pengembangan	Urusan Wajib Perencanaan Daerah	Bappeda

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Adipura	kawasan kaki lima dan kawasan kumuh	pusat perdagangan dan jasa				kota-kota menengah dan besar		
			Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	18,71	18,93	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Urusan Lingkungan Hidup	BLH; DKPP
		b. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir	Lingkungan pemukiman kumuh	0,67%	0,46%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas Tata Kota dan perumahan
	2. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sampah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	20,50%	73,22%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DKPP; BLH; 38 Kantor Kelurahan
h. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata.	Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata	Pengembangan daya tarik obyek wisata	Jumlah Kunjungan wisatawan	7.785 Org	12.685 Org	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	Disbudpar
i. Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services).	Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu	Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu	Lama proses perijinan	1-4 hari	1-2 hari	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum	KPPT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
j. Terbukanya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian, dan kewirausahaan	Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran	Angka partisipasi angkatan kerja	67,79	72,89	Program peningkatan kesempatan kerja	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	Disosnakertrans
k. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dengan dukungan hasil SDA yang berkualitas.	Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan	Ketersediaan pangan utama	23.960 ton	26.356 ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Urusan Wajib Ketahanan Pangan	Dispertanak; Dishutbun; BKPP
			Tingkat Pendapatan petani	8%	13%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan Wajib Ketahanan Pangan	BKPP; Dispertanak; Dishutbun
			Cakupan bina kelompok industri hasil perikanan dan kelautan	4 Klpk	20 Klpk	Program Industrialisasi Hasil Perikanan dan Kelautan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
l. Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup daerah	Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah	Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat	Dokumen KLHS Dokumen AMDAL	60%	100%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan	Lingkungan Hidup	BLH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						Hidup		
m. Terwujudnya pengelolaan DAS yang memadai	Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai	Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan Daerah Aliran Sungai	Rasio Jaringan Irigasi	45,57	47,48	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU dan Tamben
n. Tereksplorasinya SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang	Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan	Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA	% Pertambahan tanpa ijin yang ditertibkan	13,20%	25,00%	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	SETDA (Bag. Ekonomi) Dinas PU dan Tamben
			Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	5,58%	5,99%	Program Pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas PU dan Tamben
o. Terlindunginya kawasan sumber mata air	Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan	Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air	Sumber mata air Terlindungi	60%	90%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Urusan Lingkungan Hidup	BLH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	sumber mata air		Luas Lahan Kritis	4.690 Ha	2.190 Ha	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Urusan Pilihan Kehutanan	Dishutbun
p. Tersedianya SOP penanggulangan bencana	Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana	Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana	Perda RPB dan SOP Penanggulangan Bencana	Tidak Ada	Ada	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum	BPBD
q. Terciptanya stabilitas daerah	Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.	Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik	Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan	4,34	6,00	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbanglinmas; Kecamatan; Kelurahan
			Penegakan Perda	100,00%	100,00%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas ; Satpol PP
			Angka kriminalitas dan gangguan keamanan per 10.000 penduduk	31,92	7,89	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas ; Satpol PP

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (Outcomes)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
r. Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab	Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik	Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik	76,12%	85%	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bakesbanglin mas

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

3.1. Urusan Konkuren

Urusan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

3.1.1. Ringkasan Pelaksanaan Urusan Wajib

Ringkasan urusan wajib, realisasi belanja dan nama-nama SKPD pelaksana urusan wajib diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Ringkasan Urusan Wajib, Realisasi Belanja dan Nama-Nama SKPD Pelaksana Urusan Wajib Kota Bima Tahun 2018

No	Urusan Wajib	Alokasi Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Nama-Nama SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.	Pendidikan	37,646,341,500.00	36,734,380,182.08	97.58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	39,572,625,148.00	37,333,925,491.52	94.34	Dinas Kesehatan
		100,000,000.00	99,801,000.00	99.80	Kecamatan Mpunda
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171,200,899,000.00	168,616,150,707.89	98.49	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5,049,991,000.00	4,744,668,770.41	93.95	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6,372,826,000.00	6,240,247,569	97.92	Satuan Polisi Pamong Praja
		2,165,900,000.00	2,122,125,219.00	97.98	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6.	Sosial	2,315,000,000.00	2,281,367,000.00	98.55	Dinas Sosial
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1.	Tenaga Kerja	1,850,000,000.00	1,782,230,000.00	96.34	Dinas Tenaga Kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,825,200,000.00	1,566,492,269.00	85.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.	Pangan	2,530,000,000.00	2,377,797,116.24	93.98	Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Wajib	Alokasi Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Nama-Nama SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6
4.	Pertanahan	12,153,380,000.00	2,476,071,560.00	20.37	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.	Lingkungan Hidup	13,018,000,000.00	11,501,580,364.00	88.35	Dinas Lingkungan Hidup
		119,723,000.00	116,695,400.00	97.47	Sekretariat Daerah
6.	Administrasi Kependudukan dan Cakil	3,661,678,000.00	3,466,528,183.00	94.67	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	243,996,000.00	232,086,305.00	95.12	Sekretariat Daerah
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,172,745,000.00	3,704,335,436.00	88.77	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9.	Perhubungan	3,820,334,000.00	3,644,235,169.00	95.39	Dinas Perhubungan
10.	Komunikasi dan Informatika	4,770,000,000.00	4,687,883,769.00	98.28	Dinas Komunikasi Dan Informatika
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,482,908,500.00	2,252,863,270.00	90.73	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
		178,015,000.00	131,095,782.00	73.64	Sekretariat Daerah
12.	Penanaman Modal	2,350,000,000.00	2,319,549,239.00	98.70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	784,086,000.00	778,457,500.00	99.28	Dinas Pariwisata
14.	Statistik	2,139,701,000.00	1,896,880,627.00	88.65	Dinas Statistik Daerah
		139,442,725.00	129,930,593.00	93.18	Sekretariat Daerah
15.	Persandian	-	-	-	-
16.	Kebudayaan	497,189,500.00	481,137,500.00	96.77	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
17.	Perpustakaan	2,350,000,000.00	2,274,168,285.30	96.77	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

Rekapitulasi alokasi belanja yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal) serta realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung urusan wajib dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.1.2. Ringkasan Pelaksana Urusan Pilihan

Ringkasan pelaksanaan urusan pilihan, realisasi belanja dan nama-nama SKPD pelaksana urusan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Ringkasan Pelaksanaan Urusan, Realisasi Belanja dan Nama-Nama SKPD Pelaksana Urusan Pilihan Kota Bima Tahun 2018

No	URUSAN PILIHAN	ALOKASI ANGGARAN/DANA	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	SKPD PELAKSANA
1	2	4	5	6	7
1.	Kelautan dan Perikanan	3,981,425,000.00	3,920,721,960.00	98.48	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.	Pariwisata	5,428,000,000.00	5,343,795,866.75	98.45	Dinas Pariwisata
3.	Pertanian	10,345,265,000.00	10,060,912,604.00	97.25	Dinas Pertanian
4.	Kehutanan	-	-	-	-
5.	Energi Dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-
6.	Perdagangan	3,197,789,500.00	3,146,026,211.97	98.38	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
7.	Perindustrian	2,519,302,000.00	1,447,728,700.46	57.47	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
8.	Transmigrasi	-	-	-	-

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

Rekapitulasi alokasi belanja yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal) serta realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung urusan pilihan dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.1.3. Ringkasan Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Ringkasan alokasi belanja, realisasi belanja dan nama-nama SKPD pelaksana urusan pemerintahan fungsi penunjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Ringkasan Alokasi Belanja, Realisasi Belanja dan Nama-Nama SKPD Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kota Bima Tahun 2018

No	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	ALOKASI ANGGARAN/DANA	REALISASI FISIK (DANA)	TINGKAT CAPAIAN (%)	SKPD PELAKSANA
1	2	4	5	6	7
1.	Administrasi Pemerintahan	40,632,714,525.00	38,715,302,224.95	95.28	Sekretariat Daerah
		17,960,000,000.00	17,449,033,220.00	97.15	Sekretariat DPRD
		2,206,400,000.00	2,110,223,552.00	95.64	Kecamatan Rasanae Barat

		2,513,800,000.00	2,508,172,600.00	99.78	Kecamatan Rasanae Timur
		2,232,200,000.00	2,150,717,085.00	96.35	Kecamatan Asakota
		2,812,800,000.00	2,789,625,647.00	99.18	Kecamatan Mpunda
		3,092,000,000.00	3,081,262,468.00	99.65	Kecamatan Raba
		56,203,648,160.00	28,626,002,256.36	50.93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengawasan	3,725,000,000.00	3,568,278,580.00	95.79	Inspektorat
3.	Perencanaan	7,893,367,000.00	6,504,178,387.00	82.40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
4.	Keuangan	15,650,000,000.00	14,993,391,351.00	95.80	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.	Kepegawaian	4,625,285,000.00	4,290,691,841.00	92.77	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

3.1.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga lain pada Pemerintah Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima

No	Perangkat Daerah	Nama SKPD	Jumlah Personil (PNS)
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten	1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
		2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1
		3) Asisten Administrasi Umum	1
3	Bagian	1) Bagian Umum	23
		2) Bagian Humas dan Protokol	18
		3) Bagian Organisasi	15
		4) Bagian Perekonomian Dan Usaha Daerah	12
		5) Bagian Kesejahteraan Rakyat	13
		6) Bagian Hukum	16
		7) Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan	17

No	Perangkat Daerah	Nama SKPD	Jumlah Personil (PNS)
1	2	3	4
		LPBJ	
		8) Bagian Administrasi Pemerintahan	14
4	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	28
5	Inspektorat	Inspektorat	49
6	Dinas Daerah	1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	77
		2) Dinas Kesehatan	78
		3) Dinas Sosial	29
		4) Dinas Tenaga Kerja	19
		5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23
		6) Dinas Ketahanan Pangan	23
		7) Dinas Lingkungan Hidup	150
		8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36
		9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50
		10) Dinas Perhubungan	29
		11) Dinas Komunikasi dan Informatika	27
		12) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	38
		13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
		14) Dinas Statistik Daerah	28
		15) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	30
		16) Dinas Kelautan dan Perikanan	29
		17) Dinas Pariwisata	36
		18) Dinas Pertanian	97
8	Lembaga Teknis	1) Satuan Polisi Pamong Praja	88
		2) Inspektorat	49
		3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
		4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	37
		5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75
		6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32
		7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29
9	Kecamatan	1) Kecamatan Asakota	21
		2) Kecamatan Rasanae Barat	12

No	Perangkat Daerah	Nama SKPD	Jumlah Personil (PNS)
1	2	3	4
		3) Kecamatan Mpunda	17
		4) Kecamatan Rasanae Timur	15
		5) Kecamatan Raba	16

Sumber :Bagian Hukum,

Rekapitulasi personil SKPD, mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, serta staf, untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.2. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

3.2.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Pendidikan	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor</p>	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan penilaian AKJG</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa</p> <p>Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Non Formal</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Pendataan Pendidikan Unit Pelaksana Akreditasi</p> <p>Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya Pengembangan Taman Budaya</p>	
2.	Kesehatan	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Penilaian AKJG</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p>	Dinas Kesehatan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK) Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya Pencegahan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular</p> <p>Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan Kesehatan Institusi Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat Komunikasi Informasi dan Edukasi</p>	
		<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum Pembinaan Kebersihan Lingkungan Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum</p> <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Peningkatan imunisasi Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria) Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Pencegahan Dan Penanganan HIV/AIDS</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan</p> <p>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas</p> <p>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat</p> <p>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium</p> <p>Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja Pelayanan Kesehatan Usila Monitoring, Evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat</p>	Kecamatan Mpunda
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD</p>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Peningkatan Jalan & Jembatan Peningkatan Jalan Peningkatan Jembatan</p> <p>Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan</p> <p>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</p> <p>Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Pemeliharaan turap/talud/bronjong</p> <p>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan</p> <p>Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan</p> <p>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan Jaringan Irigasi</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah</p> <p>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pendampingan Program NUSP-Phase 2 Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)</p> <p>Program pembangunan infrastruktur perdesaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Survey dan pemetaan</p> <p>Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang</p> <p>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penerbitan Sertifikasi IMB</p>	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelolaan Arsip Kantor</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p>	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pendataan perumahan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa Pengelolaan Rusunawa</p> <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah SederhanaSehat</p> <p>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (Pokja)</p> <p>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana social Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Pendampingan pembangunan rumah terdampak banjir bandang</p> <p>Program Pengembangan Kawasan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru</p>	
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p>	Satuan Polisi Pamong Praja

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan dan pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban Pendataan pengaduan dan informasi dari masyarakat</p> <p>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksanaan Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar Pemberdayaan satuan polisi pamong praja untuk pengamanan wilayah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kerja sama peningkatan batas wilayah</p> <p>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi</p> <p>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olahraga</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Koordinasi Forum antar Etnis</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan Verifikasi kelengkapan dokumen administrasi permohonan rekomendasi bantuan keuangan Penyelenggaraan pemilihan umum</p>	
6.	Sosial		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p>	Dinas Sosial

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</p> <p>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>Pengadaan mebeleur</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p> <p>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</p> <p>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</p> <p>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p> <p>Penyuluhan Sosial</p> <p>Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</p> <p>Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Program pembinaan anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pelayanan psikososial terhadap anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus (AMPK) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
2.1	Tenaga Kerja		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Tenaga Kerja

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja</p> <p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)</p> <p>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor <p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan Studi Banding <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p> <p>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</p> <p>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Penyusunan Laporan Gaji berkala, Impasing dan KP4</p> <p>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan</p> <p>Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)</p> <p>Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p>Evaluasi pelaksanaan PUG</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak</p> <p>Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)</p> <p>Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah</p> <p>Penguatan Kelompok Forum Anak</p> <p>Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak</p> <p>Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah</p> <p>Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT</p> <p>Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan</p> <p>Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan</p> <p>Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT</p> <p>Kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender Pembentukan kelompok dan pelatihan fasilitator pendidikan untuk perempuan</p> <p>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS</p>	
2.3	Pangan		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparat Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat</p>	Dinas Ketahanan Pangan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program peningkatan ketahanan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Peningkatan mutu dan keamanan pangan Penyuluhan sumber pangan alternatif Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/pertanian unggulan daerah	
2.4	Pertanahan		
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pembebasan/Pengadaan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.5	Lingkungan Hidup		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Dinas Lingkungan Hidup

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Koordinasi penyusunan AMDAL</p> <p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</p> <p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan</p> <p>Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan</p> <p>Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas Elpiji</p>	Sekretariat Daerah
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil Profil Kependudukan Pemutahiran Data Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK Penyusunan Buku Agregat Pelayanan Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Sekretariat Daerah, 5 Kecamatan
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Penilaian AKJG</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pembinaan Keluarga Berencana Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana</p> <p>Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat</p> <p>Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB Pengadaan alat kontrasepsi</p> <p>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Orientasi Kader Pendataan Keluarga Operasional Kader pendataan keluarga Monitoring kegiatan pendataan keluarga Koordinasi Pengelolaan Program</p> <p>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Kegiatan Pendampingan Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</p> <p>Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan</p>	
2.9	Perhubungan		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olah Raga Pengadaan Rompi Juru Parkir</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p>	Dinas Perhubungan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Penyusunan dan Penetapan Raperda Parkir Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light Revitalisasi Traffic Light Peningkatan Pelaksanaan Forum LLAJ Penyediaan Lahan Parkir Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Pengadaan Alat Uji Kebisingan Suara Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal Pengaturan dan Penarikan Retribusi Terminal Program Perhubungan Laut Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut	
2.10	Komunikasi dan Informatika		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Dinas Komunikasi dan Informasi

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>daerah</p> <p>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p> <p>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</p> <p>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</p> <p>Pengadaan alat studio dan komunikasi</p> <p>Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</p> <p>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Program kerjasama informasi dengan mas media</p> <p>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</p> <p>Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika</p> <p>Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Website</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</p> <p>Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik</p> <p>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</p> <p>Pengelolaan Proses Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah</p> <p>Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah</p> <p>Monev Teknologi informasi dan Komunikasi</p> <p>Bimtek Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel Monitoring Menara Telekomunikasi</p> <p>Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Pelaksanaan analisis Kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah</p>	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif Operasionalisasi dan pengembangan UPT PLUT</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Pendampingan bagi kelembagaan koperasi</p> <p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p>	
2.12	Penanaman Modal		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA Penyusunan LAKIP dan LPPD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Kajian kebijakan penanaman modal Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan Pendataan Potensi Obyek Perijinan</p>	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga		
		<p>Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pembinaan dan Pemasarakatan</p>	Dinas Pariwisata

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga</p>	
2.14	Statistik	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian Olah Raga</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD</p> <p>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Data Statistik Kependudukan</p>	Dinas Statistik Daerah

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Penyusunan data statistik kesejahteraan sosial Penyusunan data statistik ekonomi Penyusunan data statistik Infrastruktur Bimtek Pengembangan Data Statistik Sektoral Pelatihan Petugas Lapangan Kegiatan Statistik Sektoral Penyusunan Indeks GINI Analisis IPM Kota Bima Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Profil Daerah Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pembaharuan (Updating) Data Capaian Kinerja RPJMD Pembuatan Website Pembaharuan (Updating) Data Kemiskinan Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Penyusunan ICOR SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Koordinasi / Konsultasi Pengendalian Inflasi Daerah	
2.15	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Kegiatan pengembangan keragaman budaya daerah Penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
2.17	Perpustakaan	<p>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber day Air dan Listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang Cetak dan penggandaan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubel Kantor Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</p> <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan dan pelatihan format Konsultasi dan Studi Banding</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan semester Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan perangkat Daerah Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD</p> <p>Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip Pembangunan sistim keamanan penyimpanan Data</p> <p>Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi Kearsipan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</p>	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pelaksanaan Audit Pengawasan Penyusunan Produk Hukum Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Bahan Pustaka</p>	

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

c. Urusan Pilihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pilihan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
3.1	Kelautan dan Perikanan	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Koordinasi Hari Nusantara</p> <p>Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Peng. Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Fisik UPR & HSRT Peng. Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya</p> <p>Program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap Peng. Sarana Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap</p> <p>Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)</p> <p>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penyediaan sarana prasarana pemasaran</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		dan pengolahan hsl Perikanan Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)	
3.2	Pariwisata	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara</p>	Dinas Pariwisata

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>di dalam dan di luar negeri</p> <p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata</p> <p>Penyusunan Data Base Ekonomi Kreatif MICE</p> <p>Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya</p> <p>Kegiatan Pendampingan dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional</p> <p>Car Free day</p> <p>Program pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha</p> <p>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</p> <p>Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata</p> <p>Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW</p> <p>Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW</p> <p>Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW</p> <p>MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan</p> <p>Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata</p> <p>Kegiatan Pendampingan dan pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha dan Industri Jasa Pariwisata Lembaga dan Mitra Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan SDM Kepariwisataan</p> <p>Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya</p> <p>Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata</p> <p>Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata, Lembaga Kepariwisataan dan rekomendasi Ijin Pemandu Wisata</p> <p>Standarisasi dan Sertifikasi Segala Bentuk Usaha dan Industri Jasa Pariwisata</p> <p>Kegiatan Pendampingan dan Pembentukan Kelompok masyarakat dan Mitra</p>	
3.3	Pertanian		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p>	Dinas Pertanian

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> <p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</p> <p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</p> <p>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>Pengadaan peralatan gedung kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Pelaksanaan Penilaian AKJG</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p> <p>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Pelatihan petani dan pelaku agribisnis</p> <p>Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis</p> <p>Peningkatan kemampuan lembaga petani</p> <p>Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan</p> <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian</p> <p>Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian</p> <p>Pengembangan intensifikasi tanaman padi,</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>palawija Pengembangan perbenihan/perbibitan Pengembangan sistem informasi pasar Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian</p> <p>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna</p> <p>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan</p> <p>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyusunan program penyuluhan pertanian</p> <p>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan</p> <p>Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembibitan dan perawatan ternak Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan</p>	
3.6	Perdagangan		
		<p>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan Pendampingan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetropolitan daerah Pengawasan Peredaran Cukai Ilegal (CHT)</p> <p>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Operasi Pasar Murah</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.7	Perindustrian		
		<p>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Program pengembangan industri kecil dan menengah Lomba Rancang Busana Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Promosi produk kerajinan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri	Perdagangan

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang Dilaksanakan pada Tahun 2018

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
4.1	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Rasanae Barat Kecamatan Rasanae Timur Kecamatan Asakota Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan / Sewa Gedung Kantor / Rumah Jabatan / Dinas</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional)</p> <p>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Kepegawaian</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Korps Pegawai Negeri Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Tanda Pengenal Area Khusus Bandara</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>Bagian Humas Dan Protokol</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Promosi Daerah Promosi Daerah Melalui Media Cetak / TV / Radio / Fasilitas Umum Pemerintah / Non Pemerintah Lainnya Pameran Pembangunan / Promosi / Investasi</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekda / Staf Ahli / Humas Protokol Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah / Luar Negeri Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Optimalisasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Penyusunan Sitem Informasi Terhadap Layanan Publik Penyusunan Kalender Tahunan Pemerintah Kota Bima Koordinasi Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Pembinaan dan Pendampingan Pers) Penyusunan Buletin Pemerintah Kota Bima</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>Bagian Organisasi</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Peraturan Walikota dan Draft Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Penguatan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Bidang Perekonomian</p> <p>Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah Monev dan Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan kelautan</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p>	<p>Bagian Perekonomian Dan Usaha Daerah</p> <p>Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p> <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Mewabah</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pembinaan / Pelatihan UKS Penunjang Operasional Sekretariat UKS Lomba Sekolah Sehat (LSS)</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Peringatan Hari Besar (Keagamaan dan Nasional) Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji Pendataan Sarana Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Peksanaan Kegiatan MTQ/STQ Pembinaan Petugas Keagamaan dan Guru Ngaji Verifikasi dan Rekomendasi Bantuan Sosial, Keagamaan dan Masyarakat Rumpun Kesra Pengelolaan Masjid Terapung Kota Bima Pembinaan Remaja Mesjid</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan</p> <p>Program Peningkatan Kesegaran Jasmani</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Masyarakat dan ASN Pelaksanaan Senam Sehat Masyarakat dan ASN</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Dan Lpbj</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Konsultasi dan Studi Banding Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan</p>	<p>DPRD</p> <p>Kecamatan Rasanae Barat</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan</p> <p>Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan</p> <p>Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pendataan dan Pemutahiran Data Kependudukan dan Pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Sosial Keagamaan STQ/MQ</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p>	<p>Kecamatan Rasanae Timur</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan</p> <p>Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan</p> <p>Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pendataan dan Pemutahiran Data Kependudukan dan Pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Sosial Keagamaan STQ/MQ</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman kantor</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>Kecamatan Asakota</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan</p> <p>Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan</p> <p>Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pendataan dan Pemutahiran Data Kependudukan dan Pertanahan Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Sosial Keagamaan STQ/MQ</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman</p>	<p>Kecamatan Mpunda</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyusunan Profil Kelurahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan</p> <p>Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pendataan dan Pemutahiran Data Kependudukan dan Pertanahan Pendataan/Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Sosial Keagamaan STQ/MQ</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air</p>	<p>Kecamatan Raba</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pelaksanaan Lomba Kelurahan Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan</p> <p>Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan</p> <p>Program Penataan Daerah Otonomi Baru Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat</p> <p>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Masyarakat Pelaksanaan Sosial Keagamaan STQ/MQ</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana Mitigasi Bencana</p> <p>Program Kesiapsiagaan Gladi Tentang Mekanisme Tanggap Darurat Pembentukan Kelurahan Tangguh</p> <p>Program Rehabilitasi Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Program Rekonstruksi Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Rumah Masyarakat</p> <p>Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Diklat dan Penyuluhan kepada SKPD terkait Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (Tatap muka, Brosur, leaflet) Diklat dan Penyuluhan kepada TIM Penanggulangan Bencana (TRC, Tagana, Tim SAR, dll) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penggulungan Bencana</p> <p>Program Peringatan Dini Mengamati Gejala Bencana Menyebarkan Informasi Potensi Bencana</p> <p>Program Peningkatan Pengelolaan Pergudangan dan Logistik Manajemen Logistik dan Pergudangan</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Pengadaan Sarana Prasarana penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana</p> <p>Program Pengkajian secara cepat dan tepat Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban Analisa kerusakan sarana dan prasarana</p> <p>Program Pemenuhan kebutuhan dasar Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi Pemenuhan sandang dan pangan</p>	
4.1	Pengawasan		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</p>	Inspektorat

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan Penilaian AKJG Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah Reviu LAKIP Kota Bima Reviu RKA Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Evaluasi Pelayanan Publik Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran</p> <p>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Review laporan keuangan Pemerintah Daerah Review Penyerapan Anggaran Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH inventarisasi hasil temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Pemantauan LHKASN</p> <p>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bimtek pengawasan Operasional</p> <p>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</p> <p>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</p>	
4.3	Perencanaan		
		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Program peningkatan disiplin aparaturnya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program pengembangan data/informasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima</p> <p>Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Koordinasi Program NUSP - Phase 2</p> <p>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Perencanaan Pengembangan Kota Hijau Penyusunan Master Plan Drainase Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik</p> <p>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau) E - Planning Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara</p> <p>Program perencanaan pembangunan ekonomi Pengembangan Ekonomi Lokal</p> <p>Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penyusunan Profile Kesehatan Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra Penyusunan Profil Kelurahan Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi Penyusunan KLHS RPJMD Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Izin Penelitian Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan	
4.4	Keuangan		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pedoman Anggaran Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah Penyusunan Laporan DAK Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah</p> <p>Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Penyusunan Data Inventarisasi Aset Daerah Pendataan Ulang/Pemutahiran Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bima Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima Pindah Tangan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis SIMDA BMD</p> <p>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Sosialisasi dan Pembekalan Juru Pungut PBB Penagihan PBB pada Seluruh Kelurahan Pendataan Ulang/ Pemutahiran Data PBB Sektor Perkotaan Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Aset Daerah Pemeliharaan Data dan System PBB Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah Penatausahaan/Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	
4.5	Kepegawaian	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>Program peningkatan pengembangan sistem</p>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kecamatan Asakota

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
		<p>pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS Seleksi Jabatan ASN secara Terbuka Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN</p> <p>Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemetaan Kompetensi ASN Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas Sumber Daya ASN</p> <p>Program Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai ASN</p> <p>Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otoritas PNS Pengangkatan CPNS dan CPNS menjadi PNS Penyusunan Gaji berkala PNS Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun Pengelolaan, Pengurusan dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Taperum Pengelolaan Laporan LHKPN (laporan hasil kekayaan penyelenggara negara) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</p>	

Sumber : Data Sementara, DPPKAD Kota Bima 2019

3.2.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi pununjang pada tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.2.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kota Bima Tahun 2018

NO	URUSAN	NAMA SKPD PENYELENGGARA
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Kecamatan Asakota Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan Asakota Kecamatan Raba
6.	Sosial	Dinas Sosial
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah) Kecamatan Asakota

NO	URUSAN	NAMA SKPD PENYELENGGARA
6.	Administrasi Kependudukan dan Cakil	Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Rasanae Timur Kecamatan Asakota Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba
9.	Perhubungan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
10.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
12.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata
14.	Statistik	Dinas Statistik Daerah
15.	Persandian	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)
16.	Kebudayaan	-
16.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
III. Urusan Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.	Pertanian	Dinas Pertanian
4.	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
5.	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1.	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) Sekretariat Daerah (Bagian

NO	URUSAN	NAMA SKPD PENYELENGGARA
		Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah) Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJ) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan) Sekretariat DPRD Kecamatan Rasanae Barat Kecamatan Rasanae Timur Kecamatan Asakota Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pengawasan	Inspektorat
3.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4.	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Kepegawaian	Kecamatan Asakota Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Bagian hukum Setda Kota Bima 2019

3.2.4. Profil Kepegawaian

Profil Kepegawaian SKPD pelaksana urusan wajib berdasarkan eselon, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Profil Kepegawaian SKPD Pelaksana Urusan Pemerintahan

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD		
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		12
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan																		31
		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)																		12
		Kecamatan Asakota																		7
		Kecamatan Mpunda																		8
		Kecamatan Raba																		7
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		16
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		23
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja																		15

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH	
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD			
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			23
		Kecamatan Asakota																			9
		Kecamatan Raba																			10
6.	Sosial	Dinas Sosial																			8
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja																			15
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			14
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan																			19
4.	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																			21
5.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup																			37
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)																			6

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN							FUNGSIONAL	JUMLAH		
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA			SMP	SD
		Kecamatan Asakota																		8
		Kecamatan Mpunda																		6
		Kecamatan Raba																		8
6.	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		15
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)																		10
		Kecamatan Rasanae Timur																		2
		Kecamatan Asakota																		3
		Kecamatan Mpunda																		2
		Kecamatan Raba																		2
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		12
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan																		17
10.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika																		15

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH		
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD				
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan																			20	
12.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																				15
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata																				17
14.	Statistik	Dinas Statistik Daerah																				20
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)																				2
15.	Persandian	-																				1
16.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				12
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah																				17
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah																				20
III.	Urusan Pilihan																					
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan																				24

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH	
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD			
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata																			15
3.	Pertanian	Dinas Pertanian																			29
4.	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan																			14
5.	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan																			16
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																					
1.	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)																			4
		Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)																			15
		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)																			11
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)																			3
		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)																			7
		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)																			8

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH		
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD				
		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJ)																				11
		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)																				2
		Sekretariat DPRD																				24
		Kecamatan Rasanae Barat																				2
		Kecamatan Rasanae Timur																				3
		Kecamatan Asakota																				3
		Kecamatan Mpunda																				2
		Kecamatan Raba																				1
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				23
2.	Pengawasan	Inspektorat																				28

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN							FUNGSIONAL	JUMLAH		
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA			SMP	SD
3.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan																		34
4.	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		21
5.	Kepegawaian	Kecamatan Asakota																		1
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		25

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima 2019

Profil kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.2.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan urusan pemerintah pada pemerintahan kota bima dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.2.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11 Proses Perencanaan Pembangunan pada Urusan Pemerintahan

No.	Urusan yang Dilaksanakan	Proses Perencanaan Pembangunan
1	2	3
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD sebagai rencana kerja tahunan. RKPD ini di antaranya memuat prioritas pembangunan dan program-program SKPD; 4. Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD; dan 5. Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD.
2.	Kesehatan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.

No.	Urusan yang Dilaksanakan	Proses Perencanaan Pembangunan
1	2	3
6.	Sosial	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
3.	Pangan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
4.	Pertanahan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
5.	Lingkungan Hidup	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
6.	Administrasi Kependudukan dan Cakil	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
9.	Perhubungan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
10.	Komunikasi dan Informatika	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
12.	Penanaman Modal	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
14.	Statistik	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
16.	Kebudayaan	Proses perencanaan pembangunan yang

No.	Urusan yang Dilaksanakan	Proses Perencanaan Pembangunan
1	2	3
		dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
17.	Perpustakaan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
18.	Kearsipan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
		Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
III. Urusan Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
2.	Pariwisata	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
3.	Pertanian	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
4.	Perdagangan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
5.	Perindustrian	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1.	Administrasi Pemerintahan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
2.	Pengawasan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
3.	Perencanaan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
4.	Keuangan	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang sama dengan urusan pendidikan di atas.
5.	Kepegawaian	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman yang

No.	Urusan yang Dilaksanakan	Proses Perencanaan Pembangunan
1	2	3
		sama dengan urusan pendidikan di atas.

Sumber: BAPPEDA LITBANG Kota Bima 2019

Adapun kinerja proses perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Sinkronisasi Program Renja masing-masing SKPD dengan Program RKPD Kota Bima Tahun 2018;
2. Sinkronisasi program RKA masing-masing SKPD dengan Program Renja masing-masing SKPD;
3. Jumlah Program RENJA masing-masing SKPD yang dapat diakomodir dalam DPA masing-masing SKPD.

Guna mendapat informasi yang lebih detail tentang indikator kinerja perencanaan pembangunan oleh masing-masing SKPD yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tertentu, dapat dilihat pada dokumen lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen laporan ini.

3.2.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi sarana dan prasarana kerja pada SKPD pelaksana urusan pemerintahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja SKPD Pelaksana Urusan Wajib

No	Urusan yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		Cukup	
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		Cukup	
		Kecamatan Asakota		Cukup	
		Kecamatan Mpunda		Cukup	

No	Urusan yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Raba		Cukup	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			Kurang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman			Kurang
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		Cukup	
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			Kurang
		Kecamatan Asakota		Cukup	
		Kecamatan Raba		Cukup	
6.	Sosial	Dinas Sosial			Kurang
II URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		Cukup	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Cukup	
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan		Cukup	
3.	Pertanahan	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Cukup	
5.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)		Cukup	
		Kecamatan Asakota		Cukup	
		Kecamatan Mpunda		Cukup	
		Kecamatan Raba		Cukup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Cukup	
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)		Cukup	

No	Urusan yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
		Kecamatan Rasanae Timur		Cukup	
		Kecamatan Asakota		Cukup	
		Kecamatan Mpunda		Cukup	
		Kecamatan Raba		Cukup	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Cukup	
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan		Cukup	
10.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika		Cukup	
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan		Cukup	
12.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Cukup	
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata		Cukup	
14.	Statistik	Dinas Statistik Daerah		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)		Cukup	
16.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		Cukup	
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah		Cukup	
18.	Kearsipan	Dinas perpustakaan dan arsip daerah		Cukup	
III.	Urusan Pilihan				
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan		Cukup	
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata		Cukup	

No	Urusan yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
3.	Pertanian	Dinas Pertanian		Cukup	
4.	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan		Cukup	
5.	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan		Cukup	
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
1.	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Peng. Pembangunan dan LPBJ)		Cukup	
		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)		Cukup	
		Sekretariat DPRD		Cukup	
		Kecamatan Rasanae Barat		Cukup	
		Kecamatan Rasanae Timur		Cukup	
		Kecamatan Asakota		Cukup	
		Kecamatan Mpunda		Cukup	
		Kecamatan Raba		Cukup	
		Badan Penanggulangan		Cukup	

No	Urusan yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
		Bencana Daerah			
2.	Pengawasan	Inspektorat		Cukup	
3.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		Cukup	
4.	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		Cukup	
5.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Cukup	
		Kecamatan Asakota		Cukup	

Sumber: OPD Lingkup Kota Bima 2019

3.2.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Urusan Wajib Tahun 2018

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Sarana prasarana yang kurang memadai yang berakibat pada kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar menyebabkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok Tidak adanya data 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan mutu semua jenjang pendidikan melalui peningkatan prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi sekolah yang rusak, penggantian meubelair yang rusak, penambahan ruang kelas baru. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, pelatihan bagi pendidik dan

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		yang cukup akurat untuk memantau lulusan dari sekolah dan kursus yang telah bekerja atau telah terserap di bursa tenaga kerja, sehingga dapat diketahui tingkat relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat industri dan dunia usaha.	tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga secara bertahap dapat mencapai standar nasional pelayanan pendidikan dengan membangun beberapa lokal yang dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan, laboratorium dan penambahan komputer.
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan Dinas Kesehatan 2. Masih kurangnya dana untuk kegiatan Program Dinas Kesehatan Kota Bima 3. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan yang berbasis masyarakat. 4. Belum adanya sistem perencanaan terpadu, sehingga integrasi antar program belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Advokasi di lingkup Pemerintahan Kota dan keterlibatan Stackholder dalam peningkatan program kesehatan lebih ditingkatkan lagi 2. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk Sektor Kesehatan 3. Advokasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan kesehatan di lingkungannya 4. Advokasi masyarakat untuk terlibat dalam program UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat) 5. Advokasi Toma, Toga dan Stackholder dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 6. Koordinasi antar program lebih tingkatkan 7. Perlu dilakukan sosialisasi tentang sistem perencanaan terpadu dimasing-masing program
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pemerintah Kota segera menetapkan lokasi lahan sawah yang berkelanjutan

No .	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>prasarana sumber daya air yang telah dibangun menjadi tidak efisien karena kemanafaatannya yang tidak optimal</p> <p>2. Keterbatasan kemampuan pemerintah kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman.</p> <p>3. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan strategis terkendala kesepakatan harga tanah dengan masyarakat</p> <p>4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia baik untuk perencanaan maupun melaksanakan teknis kegiatan</p> <p>5. Belum semua bangunan yang ada memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti tidak adanya IMB ketika mendirikan bangunan tempat tinggal</p> <p>6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan serta lemahnya penerapan sanksi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang</p>	<p>2. Advokasi kepada pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan kewenangannya</p> <p>3. Meningkatkan komunikasi dan mediasi dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan harga tanah.</p> <p>4. Perlu dilakukan penambahan personil dan penguatan kapasitas SDM yang ada .</p> <p>5. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang</p> <p>6. Perlu dipersiapkan pada tahun 2018 personil yang akan mengikuti pelatihan sebagai penyidik PNS tata ruang dan Bangunan Gedung</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		7. Belum tersedianya Penyidik PNS Tata Ruang dan Bangunan Gedung untuk dapat melakukan tahapan penegakan hukum tata ruang dan bangunan gedung	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan yang layak huni. 2. Masih adanya kawasan kumuh disebabkan banyaknya rumah-rumah yang tidak memenuhi aturan Pemerintah tentang persyaratan untuk mendirikan rumah tempat tinggal, seperti tidak adanya IMB ketika mendirikan bangunan 3. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman seperti jalan lingkungan, sanitasi dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan yang layak huni 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti peraturan Pemerintahtentang tata cara mendirikan rumah tempat tinggal agar tidak terjadi kawasan kumuh. 3. Meningkatkan pembangunan jalan-jalan lingkungan dan drainase sehingga kualitas lingkungan perumahan dan permukiman menjadi baik
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan 2. Kurang memadainya kualitas Sumber Daya Aparatur Linmas 3. Banyaknya PKL yang menyimpan barang-barang mereka pada siang hari di sepanjang pinggir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat perlu ditingkatkan 2. Perlu diadakan Pelatihan Aparatur Linmas 3. Barang-barang milik para PKL tersebut diamankan Sat. Pol. PP Kota Bima dan memanggil para pemilik barang-barang tersebut untuk diberikan pengarahan dan mengembalikan

No .	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>jalan Ama Hami.</p> <p>4. banyaknya Ternak yang berkeliaran dalam Wilayah Kota Bima yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap pengguna jalan dan rusaknya Fasilitas Umum (Taman-taman Kota dan lain-lain)</p> <p>5. Semakin maraknya peredaran Miras di Wilayah Kota Bima yang mengakibatkan Tingkat Kejahatan dan Kenakalan Remaja meningkat</p>	<p>barang dagangan mereka.</p> <p>4. Melakukan operasi Penertiban terhadap Hewan Ternak yang berkeliaran dalam Wilayah Kota Bima dan memanggil Pemiliknya untuk diberikan Pengarahan dan Sanksi sesuai dengan Aturan yang berlaku</p> <p>5. Melakukan Operasi Rutin yang dianggap Rawan beredarnya Miras seperti Café, Penginapan, Losmen, Hotel dan lain-lain</p>
6.	Sosial	<p>1. Terbatasnya anggaran menyebabkan tidak terakomodirnya beberapa kegiatan, seperti penanggulangan bencana, penanganan orang terlantar, dan kegiatan lomba karang taruna, orsos, PSM dan kelompok usaha bersama (KUBE)</p> <p>2. Terbatasnya personil pada beberapa sub bagian (kepegawaian, program dan pelaporan) menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata</p> <p>4. Jumlah Penyandang masalah</p>	<p>1. Perlu penambahan anggaran yang memadai</p> <p>2. Perlu penambahan pegawai mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>3. Perlunya pemerataan dalam jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang ber hak mendapatkannya</p> <p>4. Perlunya penanganan yang sistematis bagi PMKSdi kota bima</p> <p>5. Optimalisasi cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bima sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang sistematis</p> <p>5. Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan</p>	
II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	<p>1. Secara kualitas maupun kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas perlu didukung dengan kualitas pegawai yang profesional dan memadai, hal itu tidak seimbang dengan besarnya jumlah permasalahan sosial dan permasalahan ketegakerjaan yang harus ditangani.</p> <p>2. Permasalahan ketenagakerjaan yang muncul di Kota Bima semakin kompleks seperti PHK, perselihan tenaga kerja dengan pengusaha, pengangguran, dan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh pengusaha terhadap tenaga kerja, keadaan tersebut tidak didukung dengan jumlah personil/tenaga</p>	<p>1. Mengingat jumlah pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bima sangat minim, maka diperlukan penambahan pegawai yang profesional mengingat secara kualitas dan kuantitas jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah ketenagakerjaan semakin banyak.</p> <p>2. Untuk menangani permasalahan tenaga kerja yang jumlahnya semakin kompleks di Kota Bima diperlukan tenaga mediator dan pengawas yang memadai dan profesional.</p> <p>3. Pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Bima sehingga tingkat pengangguran tidak meningkat setiap Tahunnya</p> <p>4. Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk membantu Kota</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>mediator (tenaga hubungan industri) dan pengawas yang memadai dan profesional yang dapat mengatasi masalah keternagkerjaan.</p> <p>3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia di Kota Bima masih terbatas, sedangkan jumlah pencari kerja semakin meningkat</p> <p>4. Belum adanya Balai Latihan Kerja untuk peningkatan ketrampilan masyarakat</p>	<p>Bima dalam membangun Balai Latihan Kerja.</p>
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>1. Kuantitas Sumber Daya Manusia Kurang Optimal</p> <p>2. Masih rendahnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai</p> <p>4. Belum optimalnya penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>1. Dapat dilakukan Diklat untuk meningkatkan SDM.</p> <p>2. Perlunya advokasi dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak, serta penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan keagamaan kepada pelajar dan mahasiswa.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan perempuan dan anak</p>
3.	Pangan	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-
4.	Pertanahan	<p>1. Kekurangan sarana dan prasarana</p> <p>2. Masih banyaknya</p>	<p>1. Pengadaan tambahan sarana dan prasarana</p> <p>2. Perlu pendataan akan</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> <p>3. Banyaknya permohonan dari masyarakat akan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum</p> <p>4. Biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi</p>	<p>kebutuhan lahan untuk kepentingan umum</p> <p>3. Menginventarisasi usulan masyarakat akan tanah dengan sistem prioritas</p> <p>4. Perlu penambahan alokasi anggaran yang untuk pembebasan lahan</p>
5.	Lingkungan Hidup	<p>1. Belum sepenuhnya fungsi laboratorium dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya tenaga teknis yang bersertifikat khusus yang menangani laboratorium. Di samping itu masih terbatasnya alokasi anggaran DAU untuk operasional laboratorium.</p> <p>2. Terjadi peningkatan volume timbunan sampah disebabkan Pertumbuhan penduduk serta aktifitasnya yang terus meningkat dan Meningkatnya limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>3. Pengembangan areal pemukiman baru yang tidak dilengkapi fasilitas persampahan yang memenuhi persyaratan.</p> <p>4. Pemerintah Kota Bima masih mengambil peran yang sangat dominan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya partisipasi</p>	<p>1. Perlu adanya penambahan anggaran DAU untuk operasional laboratorium lingkungan.</p> <p>2. Pemberdayaan kelurahan/kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan melalui kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir gotong royong di Kelurahan masing-masing - Mengkoordinir pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah. <p>3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk dapat menampung peningkatan volume sampah.</p> <p>4. Perlu dilakukan pembenahan kinerja pelayanan persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta lebih melibatkan partisipasi masyarakat agar memperoleh hasil</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah pada tingkat lingkungan	yang maksimal.
6.	Administrasi Kependudukan dan Capil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat yang belum terekam dalam e-KTP 2. Ruang pelayan belum memenuhi standar 3. Masih terdapat NIK ganda dalam data base kependudukan 4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya sosialisasi tentang kependudukan 2. Renovasi dan rehabilitasi ruangan pelayanan agar lebih kondusif 3. Secara intens melakukan evaluasi dan peremajaan data kependudukan dan catatan sipil 4. Menambah sarana dan prasarana dalam penataan administrasi kependudukan sehingga dapat memberikan pelayanan yg optimal bagi masyarakat
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. permasalahan drainase yang tampak kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dukungan dana kegiatan kebersihan dan fasilitas kebersihan 2. pengkajian ulang masalah aliran drainase
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas Sumber Daya Manusia Kurang Optimal 2. Kualitas dan pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang menjangkau seluruh wilayah Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan optimal 3. Belum tercapainya pemenuhan kebutuhan keluarga akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas yang diindikasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilakukan Diklat untuk meningkatkan SDM 2. Pemerataan pelayanan KB dan KR bagi seluruh masyarakat di wilayah Kota Bima 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan KB dan KR yang berkualitas dalam mewujudkan keberlangsungan dan kemandirian dalam ber KB 4. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola sebagai pembina dan penyelenggara program KB 5. Perlu ditingkatkan

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>dengan belum meningkatnya kelangsungan dan kemandirian dalam kesertaan ber KB</p> <p>4. Kualitas dan kuantitas pengelola program ditingkat lini lapangan sebagai pembinaan dan penyelenggaraan program KB masih kurang</p> <p>5. Masih tingginya angka kelahiran</p>	<p>sosialisasi KB</p>
9.	Perhubungan	<p>1. Terbatasnya lahan dan anggaran menyebabkan tidak terakomodirnya beberapa kegiatan</p> <p>2. Terbatasnya personil menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Lebar jalan dan kemampuan tonase jalan dan jembatan tidak sesuai dengan besar dan beratnya kendaraan pemakai jalan sehingga cepat rusaknya jalan/ jembatan dan sering terjadi kecelakaan dan belum tertibnya pengaturan jalur Ojek sehingga jalur trayek maupun pemungutan biaya operasinya masih kurang tertib</p>	<p>1. Perlu penambahan anggaran yang memadai</p> <p>2. Perlu penambahan pegawai mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>3. Menyusun Sistem Tataran Transportasi Lokal yang betul-betul handal secara profesional sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang rencana di sektor perhubungan secara Lokal, Regional dan Nasional.</p>
10.	Komunikasi dan Informatika	<p>1. Terbatasnya lahan dan anggaran menyebabkan tidak terakomodirnya beberapa kegiatan</p> <p>2. Terbatasnya personil menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan</p>	<p>1. Perlu penambahan anggaran yang memadai</p> <p>2. Perlu penambahan pegawai mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan</p>
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan	<p>1. Masih kurangnya personil/tenaga staf yang membantu</p>	<p>1. Menambah personil untuk membantu kelancaran</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
	Menengah	<p>tugas pada sekretariat maupun di bidang-bidang dan operasional dinas</p> <p>2. Program/kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menyentuh seluruh koperasi dan UKM yang ada di Kota Bima. Dari hasil monitoring koperasi dan UKM rata-rata menginginkan diklat manajemen keuangan dan permohonan untuk tambahan modal koperasi, kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh dinas karena anggaran yang tersedia tidak memadai</p> <p>3. Penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih terkendala kemampuan kewirausahaan pelaku. Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya</p>	<p>program/kegiatan</p> <p>2. Dinas Koperindang Kota Bima mengajukan program/kegiatan pada Departemen maupun Dinas terkait pada tingkat pusat dan propinsi sehingga untuk kegiatan yang tidak tercover pada APBD II diarahkan pada APBN dan APBD I antara lain kegiatan Diklat dan Bantuan Permodalan Koperasi. Untuk bantuan modal usaha sebagian kecil lewat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).</p>
12.	Penanaman Modal	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	<p>1. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga yang memadai</p> <p>2. Terbatasnya personil pada beberapa sub bagian (kepegawaian, program dan</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga</p> <p>2. Perlu penambahan pegawai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>3. Perlu adanya</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		pelaporan) 3. Terbatasnya anggaran	anggaran yang memadai
14.	Statistik	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-
16.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. event dan apresiasi budaya lokal masih kurang dilaksanakan 2. Pelestarian perlindungan set dan peninggalan sejarah kepurbakalaan yang belum maksimal 3. Belum maksimal tercapainya tujuan dan sasaran kinerja SKPD 4. Masih kurangnya upaya penggalan, pelestarian dan pengembangan nilai budaya, adat dan tradisi sebagai dalam tatanan kehidupan masyarakat 5. Sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya baik dalam hal fasilitas gelar seni maupun fasilitas untuk memasarkan seni masih sangat terbatas 6. Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari dan mengembangkan seni dan budaya adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pembentukan dan pelestarian budaya lokal (sanggar seni dan latihan tari tradisional) 2. Alokasi anggaran pelestarian dan perlindungan perlu untuk ditambah 3. Perlu penambahan jumlah personil/staf yang profesional yang dapat mendukung kinerja dinas 4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan 5. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk fasilitas pegelaran seni maupun pemasaran hasil seni 6. Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap generasi muda untuk lebih mengenal dan mengembangkan budaya adat
17.	Perpustakaan	1. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat khususnya pada kategori PNS, Swasta	1. Diharapkan adanya minat dan budaya membaca untuk masyarakat dan PNS demi meningkatkan

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>dan masyarakat umum</p> <p>2. SDM pengelola perpustakaan baik diperpustakaan kelurahan maupun di Sekolah belum memadai</p> <p>3. Alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan perpustakaan relatif masih rendah</p>	<p>dan mengembangkan ilmu pengetahuan</p> <p>2. Diharapkan adanya tenaga pengelola perpustakaan dimasing-masing sekolah maupun di Kelurahan</p> <p>3. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan Daerah yaitu dengan membangun gedung perpustakaan Daerah yang memadai</p>
18.	Kearsipan	<p>1. Kondisi dan letak gedung kantor belum memadai.</p> <p>2. SDM (Arsiparis) belum ada</p> <p>3. Gudang Arsip belum ada</p>	<p>1. Pembangunan gedung kantor di lokasi yang representatif.</p> <p>2. Perlu adanya dana untuk mengikuti Diklat/ Pelatihan Arsiparis.</p> <p>3. Dibangun gudang arsip.</p>
III. Urusan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	Menumpuknya pekerjaan pada bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, karena tidak sinkronnya struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dengan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB dan struktur organisasi pusat.	Perlu perubahan dan penyesuaian struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.
2.	Pariwisata	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-
3.	Pertanian	1. Pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dari target 50 kelompok terdapat	Kelompok telah diimbau untuk membentuk kepengurusan yang baru dan menyelesaikan masalah internal.

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		<p>2 kelompok yang tidak memiliki rekening kelompok disebabkan oleh ketua kelompoknya meninggal dunia, dan kelompok yang satu lagi disebabkan oleh konflik internal kelompok.</p> <p>2. Pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealiala terdapat 4 kelompok yang tidak memiliki rekening kelompok dari target 80 kelompok.</p> <p>3. Kegiatan pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan terdapat kesalahan kode akun dalam POK dalam sub kegiatan sosialisasi benih.</p>	
4.	Perdagangan	<p>1. Program/Kegiatan seperti monitoring sembako, harga, alat ukur dan barang kadaluarsa belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana dan Prasarana seperti kendaraan dan alat ukur</p> <p>2. Masih minim bantuan modal bagi usaha perdagangan</p> <p>3. Permintaan bantuan peralatan bagi pedagang kaki lima (Tenda dan Gerobak Kios)</p>	<p>1. Diharapkan APBD II untuk Tahun yang akan datang dinaikkan untuk memenuhi Program Kegiatan dimaksud.</p> <p>2. Untuk kegiatan yang tidak terkafer pada APBD II diupayakan diajukan pada KEMENTERIAN maupun DINAS TINGKAT I terutama bantuan peralatan (tenda), dan bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang memberikan bantuan peralatan berupa gerobak, tenda dan etalase</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
5.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/Kegiatan seperti Diklat, magang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya dana serta sarana dan prasarana seperti workshop (bengkel kerja) dan showroom belum dapat diadakan/dibangun 2. Masih minimnya bantuan modal bagi usajha industri 3. Permintaan bantuan peralatan bagi usaha-usaha industri (IKM) 	<p>Diharapkan APBD II untuk tahun yang akan datang dinaikkan untuk memenuhi program kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang tidak terkafer pada APBD II diupayakan diajukan pada KEMENTERIAN maupun pada DINAS TINGKAT I terutama bantuan peralatan industri dan bantuan Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC)</p>
IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
1.	Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih kurangnya personil / staf 2. dana pendukung kegiatan-kegiatan kantor yang masih minim 3. angka & tingkat kemiskinan cenderung menurun tetapi masih banyak penduduk miskin yang masuk ke dalam kategori hampir miskin, kesempatan kerja penduduk miskin dan termarginalisasi petani akibat adanya fungsi lahan pertanian 4. masih minimnya sarana dan prasarana pendukung didalam pelayanan guna menjalankan roda pemerintahan di tingkat kelurahan 5. keterbatasan data & informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menambah tenaga operator komputer dan staf penagih PBB 2. peningkatan pos anggaran untuk kelurahan 3. ketetapan sasaran dari program yang memastikan data kemiskinan yang sudah dimuktahirkan melalui pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan dan menerapkan makro ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga serta penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen 4. perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang didalam menjalankan roda pemerintahan di

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		6. Belum optimalnya koodinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	tingkat kelurahan 5. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi 6. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
	Pengawasan	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-
	Perencanaan	1. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kerja guna menunjang kegiatan perencanaan 2. Masih terbatasnya SDM perencana baik kualitas maupun kuantitas 3. Masih kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan kota khususnya di tingkat SKPD. 2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan kota, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. 3. Meningkatkan sinkronisasi, konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota
	Keuangan	1. Belum memadainya kualitas Sumber Daya Manusia terhadap sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang masih kurang umyuk melaksanakan kewajibannya melunasi pajak dan retribusi pajak 3. belum maksimalnya penatausahaan	1. melaksanakan pembekalan juru pungut PBB 2. Melaksanakan Diklat/Bintek sistem pengelolaan keuangan daerah 3. Melaksanakan sosialisasi pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 4. Melakukan Asiatensi Penyelesaian Kepatuhan Pembayaran PD/RD serta Teguran secara tulisan maupun

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		pengelolaan aset daerah	langsung kepada Waib PD/RD 5. Melaksanakan Bintek penatausahaan pengelolaan aset 6. Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset kepada SKPD
	Kepegawaian	<p>1. Masih rendahnya angka presentase Pejabat (JPT, Administrator dan pengawas) yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) yang dipersyaratkan karena menduduki jabatan ASN sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, disebabkan oleh minimnya ketersediaan alokasi anggaran untuk Diklat Penjurangan PNS dalam APBDPenerimaan CPNSD tahun 2013 tidak bisa dilaksanakan karena persentase belanja pegawai di APBD lebih dari 50 %</p> <p>2. Belum adanya perangkat Computer Assited Test (CAT) yang memadai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan seleksi PNS baik untuk keperluan pengadaan PNS, ujian dinas, ujian penyesuaian Ijazah dan Assesment bagi calon JPT masih meminjam CAT ditempat lain.</p> <p>3. Pelaksanaan Diklat</p>	<p>1. Perlu diusulkan kepada Walikota agar jumlah alokasi anggaran untuk Diklatpim dapat ditingkatkan setiap Tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah guna dapat meningkatkan presentase Pejabat Pemerintah Kota Bima yang mengikuti DIKLATPIM.</p> <p>2. perlu diupayakan penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana CAT Pemerintah Kota Bima dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah guna menjamin kualitas sumber daya aparatur</p> <p>3. Menunjuk surat Edaran Walikota agar setiap pelaksanaan Diklat (Struktural dan Fungsional) baik teknis maupun non teknis agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan penganggarannya agar dimasukkan pada Rencana Kerja BKD Kota Bima dan penambahan anggaran untuk diklat kepemimpinan.</p>

No	Urusan yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
		(Struktural dan fungsional) bagi teknis dan non teknis masih ada yang dilaksanakan oleh SKPD masing-masing	

3.3. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum

3.3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun 2018

No	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4
I.	Urusan Pemerintahan Umum		
		<p>Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Koordinasi Forum antar Etnis</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik</p>	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum selama tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara urusan pemerintahan umum pada Pemerintah Kota Bima adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.15 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Kota Bima Tahun 2018

NO	URUSAN	NAMA SKPD PENYELENGGARA
1.	Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.3.4. Profil Kepegawaian

Data kepegawaian pada SKPD penyelenggara urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16 Profil Kepegawaian Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018

NO	Urusan	OPD Pelaksana	ESELON			GOLONGAN				PENDIDIKAN									FUNGSIONAL	JUMLAH	
			II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD			
1	Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik																			14

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima 2019

Profil Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran LPPD ini.

3.3.6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.17. Proses Perencanaan Pembangunan pada Urusan Pilihan

No.	Urusan yang Dilaksanakan	Proses Perencanaan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
1.	pemerintahan umum	Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013; 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD sebagai rencana kerja tahunan. RKPD ini di antaranya memuat prioritas pembangunan dan program-program SKPD; 4. Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD; dan 5. Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD.

Adapun kinerja proses perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Sinkronisasi Program Renja masing-masing SKPD dengan Program RKPD Kota Bima Tahun 2018;
2. Sinkronisasi program RKA masing-masing SKPD dengan Program Renja masing-masing SKPD;
3. Jumlah Program RENJA masing-masing SKPD yang dapat diakomodir dalam DPA masing-masing SKPD.

Guna mendapat informasi yang lebih detail tentang indikator kinerja perencanaan pembangunan oleh masing-masing SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, dapat dilihat pada dokumen lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen laporan ini.

3.3.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi sarana dan prasarana kerja pada SKPD penyelenggara urusan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja SKPD Penyelenggara Urusan Pilihan

No	Urusan Yang Dilaksanakan	SKPD Pelaksana	Kondisi Sarana Dan Prasarana		
			Lengkap	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6
1	pemerintahan umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		cukup	

3.3.8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi beserta solusi dalam menghadapi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat ditabelkan seperti berikut.

Tabel 3.19 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pilihan Tahun 2018

No	Urusan Yang Dilaksanakan	Masalah Dan Solusi	
		Masalah	Solusi
1	2	3	4
1	pemerintahan umum	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini	-

3.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Urusan Wajib dan Pilihan, serta Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan dapat dilihat pada Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019): **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.** Tema tersebut dalam pelaksanaannya selanjutnya dijabarkan kedalam strategi pembangunan nasional yang secara umum menggariskan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

- Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

b. Target dan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2018

Adapun target dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

No	Indikator Ekonomi	Skenario Target 2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(5,4 – 6,1)
2	Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	5,3 - 5,5
3	Angka Kemiskinan (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0 - 10,0
4	Gini Ratio (indeks) (Realisasi & Penyesuaian Target)	0,38
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
6	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	
7	Inflasi (%): average	3,5 □ 1
8	Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600
9	ICP (USD/Barrel)	55
10	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	830
11	Lifting Gas (BOE/hari)	1.250

c. Norma Pokok Pembangunan yang Diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 :

1. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin besar
4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

d. Dimensi Pembangunan :

- 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dengan prioritas :
 - i. Revolusi Mental
 - ii. Pendidikan
 - iii. Kesehatan
 - iv. Perumahan dan Permukiman

- 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan prioritas :
 - i. Kedaulatan Pangan
 - ii. Kedaulatan Energi
 - iii. Kemaritiman dan Kelautan
 - iv. Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK
 - v. Pembangunan Pariwisata
- 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dengan prioritas :
 - i. Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan
 - ii. Pemerataan Antar Desa dan Kawasan Pedesaan
 - iii. Daerah Perbatasan
 - iv. Daerah Tertinggal
 - v. Perkotaan
 - vi. Reformasi Agraria
 - vii. Konektifitas Nasional
- 4) Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan, dengan prioritas:
 - i. Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi
 - ii. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
 - iii. Kepastian dan Penegakan Hukum
 - iv. Reformasi Birokrasi
- 5) Dimensi Pembangunan Ekonomi, dengan prioritas:
 - i. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
 - ii. Peningkatan Ekspor non Migas
 - iii. Reformasi Fiskal

d. Arah Kebijakan Prioritas Nasional

Arah kebijakan prioritas nasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:
 - a. peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit;
 - b. pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) II;
 - c. pengembangan industri pertahanan; dan
 - d. penguatan pertahanan wilayah perbatasan.
 2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui:
 - a. penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik;
 - b. penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial;
 - c. peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
 - d. perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri
 - e. yang kuat;

- f. pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di *Association of Southeast*
 - g. *Asian Nations* (ASEAN) yang mendukung kepentingan nasional;
 - h. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang
 - i. efektif;
 - j. penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan
 - k. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dunia;
 - l. penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros maritim dunia;
 - m. penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap;
 - n. peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
 - o. pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan
 - p. penguatan intelijen dan kontra intelijen.
3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:
- a. penegakan hukum yang berkualitas;
 - b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
 - c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:
- a. perluasan implementasi *e-Government* yang terintegrasi;
 - b. penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas
 - c. SDM pelayanan;
 - d. penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur; dan
 - e. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

- Pengarusutamaan Gender (PUG)

Arah kebijakan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional yang terkait dan sejalan dengan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); (ii) peningkatan upaya (model) layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh Pemda/OPD; (iii)

- peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di K/L/Pemda; (iv) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang PUG; dan (v) peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha tentang KGPP.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan upaya pencegahan KtP, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media; (ii) peningkatan koordinasi/sinergi antar K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan KtP, termasuk TPPO; (iii) peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban KtP; (iv) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (v) penyediaan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk diseminasi hasil survei kekerasan terhadap perempuan.
 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (i) pelaksanaan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (ii) penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG tingkat pusat dan daerah; (iii) peningkatan kapasitas K/L/OPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut; (iv) penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (v) pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan (vi) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.
- Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
- Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah:
1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro.
 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan.
 3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah.
 4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam.
 5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya.

6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di tingkat daerah.

- Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim

Arah Kebijakan

1. Penguatan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
 - b. Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
 - c. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, antara lain melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi baru dan terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik;
 - d. Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
 - e. Pengembangan dan mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF);
 - f. Peningkatan inventarisasi GRK di Pusat dan Daerah.
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan melakukan:
 - a. Penyempurnaan indeks kerentanan dan indikator adaptasi;
 - b. Pelaksanaan strategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di 15 (lima belas) daerah rentan;
 - c. Peningkatan kapasitas *stakeholder* K/L dalam perencanaan aksi nasional adaptasi perubahan iklim serta penguatan koordinasi antar K/L di tingkat pusat;
 - d. Penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim;
3. Finalisasi sistem informasi dan *database* kerentanan, sistem penandaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Kota Bima tahun 2018 difokuskan pada upaya penanganan isu strategis yaitu 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2) Infrastruktur dan investasi; 3) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup pasca bencana.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Bima

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		pendidikan keagamaan.		terhadap ajaran agama	PEMBANGUNAN AGAMA	Sosial Kemasyarakatan	

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, 3. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 4. Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; 6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, serta Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 7. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; 	<p>Kesehatan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025)</p>	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PEMBANGUNAN KESEHATAN	<p>Program Kesehatan Keluarga Kesehatan Reproduksi dan KB</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</p>	<p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS PPKB</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
3	Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau melalui penciptaan iklim kondusif dalam penyediaan perumahan, penyediaan hunian baru, fasilitasi peningkatan kualitas hunian, serta fasilitasi pembiayaan perumahan. 2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman melalui perencanaan dan penataan kawasan permukiman. 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat. 4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang b. Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman 	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	<p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p>	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
5	Kedaulatan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri; Memperlancar sistem distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu; Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat; Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan. 	Agro Industri dan Ketahanan Pangan: <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data dan informasi potensi SDA Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan Tersedianya sarana prasarana produksi yang memadai 	Meningkatnya produksi pertanian	KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasis potensi ekonomi Percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI) terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standarisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial Pengembangan keahlian tenaga kerja Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan 	<p>Wirausaha dan iklim investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat Berkembangnya investasi Terwujudnya ekspor daerah Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah <p>Kesejahteraan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional Tersedianya Nota Kesepahaman dan 	<p>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</p>	PEMBANGUNAN EKONOMI	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN :ERIJINAN TERPADU</p> <p>DINAS KOPERINDAG</p> <p>DINAS KOPERINDAG</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.	<p>Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha</p> <p>d. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi</p> <p>Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:</p> <p>e. Meningkatnya kunjungan wisatawan</p> <p>f. Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata</p> <p>g. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel</p> <p>h. Tersedianya pelaku usaha yang profesional</p>			<p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</p> <p>Program pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>Program Pengembangan</p>	<p>DINAS KOPERINDAG</p> <p>DINAS KETENAGAKERJ AAN</p> <p>DINAS KETENAGAKERJ AAN</p> <p>DINAS KETENAGAKERJ AAN</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
						SDM Kepariwisataan	
						Program pengembangan pemasaran pariwisata	DINAS PARIWISATA
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PARIWISATA
							DINAS PARIWISATA
							DINAS PERTANIAN

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
6	Kedaulatan Energi	1. Meningkatkan produksi energy primer 2. Meningkatkan cadangan energy 3. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy 4. Meningkatkan aksesibilitas energi 5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy	Infrastruktur dan konektivitas Wilayah: - Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata				
7	Infrasruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman	Pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan proyek pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian ekonomi, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan) Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor e-Government, e-Kesehatan, e-	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah: o Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas o Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata o Meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut o	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Program Pembangunan fasilitas dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras dan fasilitas LLAJ Program Pembangunan jalan dan Jembatan Program Pembangunan	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		Pendidikan, e-Logistik dan e-Commerce.				Infrastruktur Perdesaan	RUANG
8	Penanggulangan Kemiskinan	<p>a. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial <p>b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar 2. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar 3. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan <p>c. Perluasan Akses Usaha Mikro Kecil</p>	<p>Kesejahteraan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas b. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten c. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan e. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 	Meningkatnya daya saing	<p>Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p>	<p>DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS DIKBUD</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		dan Koperasi 1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; 2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha; 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha;				Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Sistem Pendukung	DINAS DUKCAPIL DINAS TENAGA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS KOPERINDAG

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
						Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
9	Pembangunan Wilayah	Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan pelayanan dasar publik - Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas - Promosi potensi untuk percepatan pembangunan - Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas - Peningkatan kualitas pelayanan lintas batas dan keamanan di kawasan perbatasan Negara - Penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan perbatasan Negara Pembangunan Pedesaan: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk di permukiman transmigrasi; <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi; <input type="checkbox"/> Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi; <input type="checkbox"/> Penguatan pemerintahan desa; <input type="checkbox"/> Pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan; 	Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang - Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang - Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas - Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan - Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup 				

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana - Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan - Percepatan pemulihan Daerah Pascabencana - Penataan ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - Penguatan kelembagaan dan regulasi kebencanaan Reforma Agraria: <ul style="list-style-type: none"> - Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat - Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif - Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan - Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana 	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Penanggulangan bencana	Program Kesiapsiagaan Program Penanggulangan/ Pencegahan Bencana Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BPBD BPBD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		<p>2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk diKawasan Transmigrasi</p> <p>3. Pembangunan SDM,Pemberdayaan,dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk diKawasan Transmigrasi</p> <p>4. Penguatan Pemerintahan Desa</p> <p>5. Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis,Konsisten,dan Berkelanjutan</p> <p>6. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota</p>					
		<p>7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk diKawasan Transmigrasi</p>			LINGKUNGAN HIDUP	<p>Program pengelolaan persampahan</p> <p>Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam</p>	<p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
						Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan 2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi 					
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 			INFRASTRUKTUR	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas				saluran drainase/gorong-gorong Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1. Mewujudkan system perkotaan Untuk pengurangan kesenjangan 2. Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP)					

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		3. Mengembangkan kota hijau Yang berketahanan iklim dan bencana			LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		1. Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat 2. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif 3. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan 4. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk					

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		kepentingan umum					
10	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Penguatan Pertahanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit 2. Pembangunan MEF II 3. Pengembangan Industri Pertahanan 4. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan 	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik b. Terwujudnya aparatur yang profesional c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah e. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi berbasis IT 	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Ketertiban dan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	BAKESBANGPOL BAKESBANGPOL

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		<p>Stabilitas Politik dan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik 2. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik 3. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik 4. Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat 5. Pemantapan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya aturan hukum yang efektif b. Aparat hukum yang profesional c. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai d. Terwujudnya aparat, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkoba e. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba f. Terwujudnya keselarasan 	<p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Meningkatnya pelayanan publik yang prima</p>	<p>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;</p> <p>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</p>	<p>Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</p> <p>BKPSDM</p> <p>INSPEKTORAT SERTDA (BAG.</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		<p>6. Penguataan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama</p> <p>Pembangunan Internasional yang efektif</p> <p>7. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia</p> <p>8. Penguatan Diplomasi Maritim sejalan dengan cita-cita</p> <p>Poros Maritim Dunia</p> <p>9. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</p> <p>10. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan</p> <p>Narkoba</p> <p>11. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia</p> <p>12. Intelijen dan Kontra Intelijen</p> <p>Kepastian Hukum:</p> <p>1. Penegakan hukum yang</p>	<p>perencanaan pembangunan daerah</p> <p>g. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik</p> <p>h. Terwujudnya pengawasan yang profesional</p> <p>i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik</p> <p>j. Tertatanya otonomi daerah</p> <p>k. Terwujudnya ormas dan orpol yang aspiratif</p>			<p>Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat</p> <p>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik</p>	<p>OPA)</p> <p>SETDA (BAG. OPA)</p> <p>SETDA (BAG. HUMAS)</p> <p>DINAS KOMINFO</p>

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
		berkualitas 2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif 3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan Reformasi Birokrasi : 1. Perluasan Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi 2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur 4. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi					

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	ARAH KEBIJAKAN RKP 2018		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
			l. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum m. Terasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan professional n. Terasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)				

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

5.1.1. Dasar Hukum

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan meliputi :

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 348 Tahun 2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2014.

Tabel 5.1.
Program Tugas Pembantuan dan Kode Satker
Tahun Anggaran 2018

No	Program Tugas Pembantuan	Kode Satuan Kerja
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	018.08.04.239133

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bima, 2018

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepala daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Bima mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan air irigasi pertanian;
- b. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian (Alsinta);
- c. Pembinaan dan pendampingan kegiatan Upsus;
- d. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi;
- e. Fasilitasi pembiayaan pertanian; dan
- f. Operasional dan dukungan kegiatan lingkup PSP.

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan merupakan urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak, berdasarkan perundang-undangan

ditetapkan sebagai urusan pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2018 merupakan turunan pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana yang mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan di Kota Bima lebih dari satu Organisasi Perangkat Daerah.

5.1.4. Program dan Kegiatan

Program dan sub kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Program dan Sub Kegiatan Tugas Pembantuan Kota Bima
Tahun Anggaran 2018

No	Program Tugas Pembantuan	OPD Pelaksana
1.	<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan air irigasi pertanian; ▪ Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian (Alsinta); ▪ Pembinaan dan pendampingan kegiatan Upsus; ▪ Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi; ▪ Fasilitasi pembiayaan pertanian; dan ▪ Operasional dan dukungan kegiatan lingkup PSP. 	Dinas Pertanian

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bima, 2018

5.1.5. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Dinas Pertanian Kota Bima meliputi beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Air irigasi Pertanian

Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian ini meliputi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang meliputi luasan areal yang diairi 300 Ha dan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan besar anggaran sebesar Rp. 766.355.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 763.355.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,61%.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Upsus

Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Upsus meliputi kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh aparat dari TNI (Dan ramil, Babinsa dan petugas TNI lainnya dalam rangka bersama-sama dengan aparat Dinas Pertanian beserta PPL melakukan mendampingi kegiatan usaha petani di lapangan, baik dalam bentuk penyuluhan, demplot, pendampingan maupun pengawalan terhadap usaha petani. Besarnya dana yang dianggarkan untuk honor petugas dari TNI sebesar Rp. 146.400.000 (seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 135.600.000 (sertau tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 92,62%.

4. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi kegiatan penyusunan RDKK, kegiatan Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk bersubsidi, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi serta kegiatan lain yang terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Besarnya dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebesar Rp. 67.800.000 (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 65.700.000 000 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 97%.

5. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian meliputi beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a). Kegiatan Sosialisasi kepada Kelompok tani dan pihak berkepentingan lainnya tentang akses pembiayaan pertanian;
- b). Kegiatan Pendampingan oleh Aparat Dinas Pertanian Kota Bima dan tenaga FPPS kepada kelompok tani untuk dapat mengakses modal usahatani;
- c). Berkoordinasi dengan pihak Bank dan lembaga keuangan lainnya serta pihak Asuransi dalam rangka membantu petani mendapatkan permodalan serta perlindungan dalam berusaha tani.

Besarnya dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebesar Rp. 44.750.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.650.000 000 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 95%.

6. Kegiatan Operasional dan Dukungan Kegiatan lingkup PSP

Kegiatan Operasional dan Dukungan Kegiatan lingkup PSP meliputi kegiatan operasional dan administrasi dalam rangka mendukung kelancaran program Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan Sarana Pertanian di Kota Bima.

Besarnya dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebesar Rp. 89.560.000 (Delapan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 88.060.000 (delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,33%.

5.1.6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Kota Bima pada dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.474.865.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.455.365.000,00 yaitu mencapai 98,68%.

Tabel 5.3.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Kota Bima
Tahun 2018

No	Program Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.474.865.000	1.455.365.000	98,68
	▪ Pengelolaan air irigasi pertanian;	360.000.000	360.000.000	100
	▪ Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian (Alsinta);	766.355.000	763.355.000	99.61
	▪ Pembinaan dan pendampingan kegiatan Upsus;	146.000.000	135.600.000	92.62
	▪ Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi;	67.800.000	65.700.000	96.90
	▪ Fasilitasi pembiayaan pertanian; dan	44.750.000	42.650.000	95.31
	▪ Operasional dan dukungan kegiatan lingkup PSP.	89.560.000	88.060.000	98.33

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bima, 2018

5.1.7. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Tugas Pembantuan Kota Bima Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan Tugas Pembantuan	Permasalahan	Solusi
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		

No	Program/Kegiatan Tugas Pembantuan	Permasalahan	Solusi
	<p>- Fasilitas penyaluran pupuk bersubsidi</p>	<p>- Masyarakat/petani mengeluhkan Beberapa pengecer masih melakukan penjualan pupuk bersubsidi dipaketkan dengan pupuk non subsidi sehingga harga jualnya menjadi tinggi;</p> <p>- Masih dijumpai truk pengangkut pupuk bersubsidi yang melewati wilayah Kota Bima tanpa dilengkapi dokumen surat jalan dari distributor.</p>	<p>- Untuk mengatasi terjadinya penjualan pupuk secara paket oleh pengecer kepada kelompok tani/petani, maka melalui Dinas Pertanian selaku ketua Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida melakukan monev di lapangan dan terhadap temuan tersebut dilaporkan ke Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Oleh KP3 telah disurati ke distributor untuk tidak melakukan hal tersebut dan dilakukan pembinaan oleh distributor kepada pengecer.</p> <p>- Terhadap truck pengangkut pupuk bersubsidi yang mengangkut pupuk bersubsidi telah dilakukan pengamanan terlebih dahulu oleh Tim Pengawas pupuk dan pestisida sambil menunggu kelengkapan berkas-berkasnya dan dilakukan pembinaan kepada distributor.</p>

No	Program/Kegiatan Tugas Pembantuan	Permasalahan	Solusi
	- Fasilitas pembiayaan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat kurangnya minat petani terutama petani padi yang mengikuti Program Asuransi Usaha Tani Padi, sementara petani peternak sapi sudah mulai tertarik mengikuti program asuransi tersebut; - Sering terlambatnya Kelompok Tani dalam mempercepat kegiatan BANSOS terutama dalam koordinasi masalah pencairan dana BANSOS; - Laporan penggunaan dana BANSOS Kelompok Tani sering kurang lengkap dalam hal ini terkait dengan administrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan minat para petani mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) maka secara intensif dilakukan sosialisasi oleh semua pihak yang terkait; - Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan PPL dan regenerasi pengurus kelompok tani; - Perlu pendampingan yang intensif oleh PPL dan juga perlu adanya anggaran pendampingan untuk PPL.

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bima, 2018

5.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bima.

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerjasama antar daerah, yaitu : 1) Suatu daerah tidak dapat mengatasi permasalahannya sendiri; 2) Adanya pengakuan atas kelebihan dan kekurangan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Efisiensi; 5) Globalisasi; dan 6) Otonomi daerah.

Pada Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kerjasama antar daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) Pihak ketiga; dan/atau 3) Lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri

Pertama, penyelenggaraan kerjasama dengan daerah lain bersifat wajib dan sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama. Kerjasama wajib mencakup: 1) Kerjasama antar daerah provinsi; 2) Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 3) Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; 4) Kerjasama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan 5) Kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, apabila kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh Daerah. Biaya pelaksanaan kerjasama wajib dihitung berdasarkan APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan. Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama, dalam melaksanakan kerjasama wajib. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

6.1.1. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Daerah

Kota Bandung

Kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjiannya selama 1 (satu) tahun mulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung

b. Dasar Hukum

Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Walikota Bandung dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/154/PK/VII/2017, yang ditandatangani oleh Walikota Bima dan Walikota Bandung pada tanggal 12 Juli 2017

c. Bidang Kerjasama

Perjanjian kerjasama sama antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerja Sama Antar Daerah.

d. Nama Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi berbagai kerjasama antar daerah

e. SKPD Penyelenggara

Satuan kerja penyelenggara kerjasama ini adalah BPKAD sebagai SKPKD dan Dinas Kominfo Kota Bima

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada BPKAD Kota Bima dan Dinas Kominfo ditambah dengan sejumlah pegawai dari SKPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung dilakukan secara cost sharing dimana Pemerintah Kota Bima Menganggarkan dari APBD.

h. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2017 sampai dapat diperpanjang setelah di lakukan peninjauan kembali dan kinerja pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi pada akhir tahun.

i. Hasil Kerjasama

Ruang lingkup kegiatan kerjasama yang dijalin bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor, balik nama dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

j. Permasalahan Dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang menjadi penghambat antara lain :

- 1) Kurangnya pemahaman *stakeholders* dan penentu kebijakan akan arti penting kerjasama antara daerah.
- 2) Masih belum optimalnya sinkronisasi masing-masing kebijakan Pemerintah Daerah yang mempunyai kekhasan sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di daerah masing – masing.
- 3) Terbatasnya perangkat peraturan dan kelembagaan untuk terciptanya *link and match* kerjasama antar daerah, khususnya di dalam negeri.
- 4) Belum siapnya kerangka kerja kerjasama daerah dalam bentuk *master plan* (rencana induk) dan data base kerjasama antar daerah.
- 5) Belum terintegrasinya sarana dan prasarana kabupaten/kota secara terpadu dalam program kerjasama antara daerah.

Solusi masalah pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Menyamakan persepsi tentang nilai positif dan konstruktif dari pelaksanaan program hubungan antar daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan program hubungan antar daerah.

Penyediaan dana yang cukup termasuk dukungan sarana dan prasarana guna mendukung program hubungan antar daerah.

6.1.2. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjiannya selama 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2018

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 melakukan perjanjian kerjasama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB).

- b. Dasar Hukum
Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB) dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/253a/PK/VII/2017, yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB) pada tanggal 21 Juli 2017
- c. Bidang Kerjasama
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB) tentang Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Propinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Nama Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi pendanaan bersama dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018
- e. SKPD Penyelenggara
Satuan kerja penyelenggara kerjasama ini adalah BPKAD sebagai SKPKD.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada BPKAD Kota Bima ditambah dengan sejumlah pegawai dari SKPD terkait.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Prov.NTB) dilakukan secara cost sharing dimana Pemerintah Kota Bima Menganggarkan dari APBD.
- h. Jangka Waktu Kerjasama
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh Para Pihak .
- i. Hasil Kerjasama
Kerjasama yang dijalin bertujuan untuk mendukung kegiatan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2018 .
- j. Permasalahan Dan Solusi
Terkait pelaksanaan kerjasama ini ada beberapa masalah yang menjadi penghambat antara lain : NPHD (Nota Kesepakatan Hibah Daerah) kepada Bawaslu yang terlambat karena belum terbentuknya Panwaslu sedangkan posisi Bawaslu di ibukota Provinsi sehingga sulit untuk berkoordinasi.

Solusi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Bawaslu NTB tentang MoU NPHD tersebut

6.1.3. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjiannya selama 12 (dua belas) bulan mulai dari tanggal 17 Desember 2017 sampai 17 Desember 2018.

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima

b. Dasar Hukum

Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/363/PK/XI/2017, 520/334/LHK, 03.3/025/948/07.1/2017 yang ditandatangani oleh Walikota Bima, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Bima pada tanggal 17 Desember 2017

c. Bidang Kerjasama

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima tentang Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Bencana Banjir

d. Nama Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi pemulihan lingkungan hidup pasca bencana banjir

e. SKPD Penyelenggara

Satuan kerja penyelenggara kerjasama ini adalah BPKAD Kota Bima sebagai SKPKD dan BPBD Kota Bima.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada BPKAD Kota Bima dan BPBD Kota Bima ditambah dengan sejumlah pegawai dari SKPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan secara cost sharing dimana Pemerintah Kota Bima Menganggarkan dari APBD.

- h. **Jangka Waktu Kerjasama**
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh Para Pihak
- i. **Hasil Kerjasama**
Kerjasama yang dijalin bertujuan untuk mendukung kegiatan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2018 .
- j. **Permasalahan Dan Solusi**
Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang menjadi penghambat antara lain :
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dimana illegal logging masih saja terjadi yang menyebabkan gundulnya hutan sebagai penyebab utama terjadinya banjir.
 - Solusi untuk masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara insentif kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bahaya banjir.

6.1.4. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. **Mitra yang Diajak Kerjasama**
Pemerintah Kota Bima melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. **Dasar Hukum**
Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Nomor : 180/78/PH/II/2018 dan Nomor : NK.02/WPB.23/2018 , yang ditandatangani oleh Walikota Bima dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 20 Maret 2018.
- c. **Bidang Kerjasama**
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Nama Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup :

1. PARA PIHAK sepaham bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada Bab V dan Bab VI yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah
2. PARA PIHAK sepaham bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik yang diwujudkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tidak lepas dari kontekstualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3. PARA PIHAK sepaham bahwa keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di setiap provinsi merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di wilayah Kota Bima, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK.

e. SKPD Penyelenggara

Satuan kerja penyelenggara kerjasama ini adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima serta berkoordinasi dengan OPD teknis lainnya.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima ditambah dengan sejumlah pegawai dari OPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

PARA PIHAK sepakat untuk tidak memasukan aspek keuangan dan/atau pendanaan yang dibutuhkan dalam kegiatan

Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Nota Kesepahaman.

h. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang, diubah atau diberhentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Ruang lingkup kegiatan kerjasama yang dijalin bertujuan untuk Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

j. Permasalahan Dan Solusi

Selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan belum dijumpai permasalahan yang berarti.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam penyediaan pelayanan publik, daerah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Bima melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak ketiga. Hal ini semata-mata ditujukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas.

6.2.1. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam hal Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun Anggaran 2018

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 893.02/1175.A/BKPSDM/VI/2018 dan Nomor : 893.2/28002/205.2/2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bima dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 28 Juni 2018.

- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun Anggaran 2018.
- d. Nama Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Tahun Anggaran 2018.
- e. SKPD Penyelenggara
SKPD yang menyelenggarakan kerjasama ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima (DPA BKPSDM Kota Bima).
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini diselenggarakan selama tanggal 3 Juli sampai dengan 26 Oktober 2018 .
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pejabat struktural di Kota Bima.
- j. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama ini antara lain kurangnya anggaran untuk mengikutsertakan pejabat struktural dalam Diklatpim II
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan Diklatpm II

6.2.2. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam hal Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun Anggaran 2018

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 893.02/1209/BKPSDM/VI/2018 dan Nomor : 893.2/31002/205.1.2/2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bima dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 16 Juli 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun Anggaran 2018.

d. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV utusan Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

e. SKPD Penyelenggara

SKPD yang menyelenggarakan kerjasama ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima (DPA BKPSDM Kota Bima).

h. Jangka Waktu kerjasama

Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ini diselenggarakan selama tanggal 25 Juli sampai dengan 12 November 2018 .

- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pejabat struktural di Kota Bima.
- j. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama ini antara lain kurangnya anggaran untuk mengikutsertakan pejabat struktural dalam Diklatpim IV
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan Diklatpim IV

6.2.3. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB dalam hal Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 893.02/1176.A./BKPSDM/VI/2018 dan Nomor : 89302/498/BPSDMD/ 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kota Bima dengan Kepala BPSDMD Provinsi NTB pada Tanggal 29 Juni 2018.
- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPSDMD Provinsi NTB adalah Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.
- d. Nama Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.
- e. SKPD Penyelenggara
SKPD yang menyelenggarakan kerjasama ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima (DPA BKPSDM Kota Bima).

- h. **Jangka Waktu kerjasama**
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPSDMD Provinsi NTB ini diselenggarakan selama Bulan Juli sampai dengan Oktober 2018 .
- i. **Hasil Kerjasama**
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan BPSDMD Provinsi NTB diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM pejabat struktural eselon IV di Kota Bima.
- j. **Permasalahan dan Solusi**
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama ini antara lain kurangnya anggaran untuk mengikutsertakan pejabat struktural dalam Diklatpim IV.
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan Diklatpim IV.

6.2.4. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB

Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjian ini selama 3 dari tahun 2017.

- a. **Mitra yang Diajak Kerjasama**
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB dalam hal Penyelenggaraan Peningkatan Mutu pada Pendidikan Masyarakat NTB.
- b. **Dasar Hukum**
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor : 180/325/PK/X/2017 dan Nomor : 1524/C.1/MOU/2017 yang ditandatangani Walikota Bima dengan Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB, pada Tanggal 20 Oktober 2017.
- c. **Bidang Kerjasama**
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat NTB adalah Penyelenggaraan Peningkatan Mutu pada Pendidikan Masyarakat NTB.
- d. **Nama Kegiatan**
Penyelenggaraan Peningkatan Mutu pada Pendidikan Masyarakat NTB
- e. **SKPD Penyelenggara**
Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.

- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima ditambah dengan pegawai pada SKPD terkait.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dan BPPAUD dan Dikmas NTB ini berlaku dalam masa waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanda tangan kerjasama.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan BPPAUD dan Dikmas NTB diharapkan dapat meningkatkan mutu dan pendidikan masyarakat di NTB umumnya dan masyarakat Kota Bima pada khususnya .
- j. Permasalahan dan Solusi
Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dengan BPPAUD dan Dikmas NTB dapat berjalan dengan baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi di lapangan, antara lain masih kurangnya kemauan dari masyarakat untuk memberikan pendidikan usia dini pada anak-anaknya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif.

6.2.5. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Salah satu mitra kerjasama Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 adalah BPJS Kesehatan dan perjanjian kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjian selama 1 tahun dari tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 17 Desember 2017.

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima dalam hal Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bima.
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/379/PK/XII/2017 dan Nomor : 121/KTR/XI-08/1217 yang ditandatangani Walikota Bima

dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, pada Tanggal 12 Desember 2017.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima adalah Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bima.

d. Nama Kegiatan

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal Program Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bima adalah Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini melalui Dinas Kesehatan Kota Bima.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Bima ditambah dengan pegawai pada SKPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dan BPJS Kesehatan ini diselenggarakan setiap tahun.

i. Hasil Kerjasama

Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan BPJS Kesehatan diharapkan memperoleh hasil peningkatan kesehatan masyarakat miskin, dengan tidak memikirkan urusan kesehatan yang sudah di asuransikan oleh Pemerintah Kota Bima.

j. Permasalahan dan Solusi

Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan Kota Bima dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima dapat berjalan dengan baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi di lapangan, antara lain masih adanya keterlambatan pengajuan klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan

upaya Pemerintah Daerah untuk mengolokasikan anggaran yang lebih.

6.2.6. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Bima

Salah satu mitra kerjasama Pemerintah Kota Bima pada tahun 2018 adalah BPJS Kesehatan.

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima dalam hal Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Bima Dalam Rangka *Universal Health Coverage* (UHC).
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/340/PK/XII/2018 dan Nomor : 1.30/KTR/XI-8/1218 yang ditandatangani Walikota Bima dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, pada Tanggal 7 Desember 2018.
- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima adalah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Bima Dalam Rangka *Universal Health Coverage* (UHC).
- d. Nama Kegiatan
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal Program Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bima adalah Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
- e. SKPD Penyelenggara
Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini melalui Dinas Kesehatan Kota Bima dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Bima.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Bima dan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Bima

ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.

- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dan BPJS Kesehatan ini berlaku untuk jangka waktu 13 (tiga belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan BPJS Kesehatan diharapkan terlaksananya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional dan *Universal Health Coverage* .
- j. Permasalahan dan Solusi
Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan Kota Bima dengan BPJS Kesehatan Cabang Bima dapat berjalan dengan baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi di lapangan, antara lain masih adanya keterlambatan pengajuan klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk mengolokasikan anggaran yang lebih.

6.2.7. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima.

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dalam hal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Bima Melalui Penggunaan Produk Layanan PT. Bank NTB.
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Nomor : 180/87/PK/III/2018 dan Nomor : PJ.01.24/64/0068/2018 yang ditandatangani oleh Walikota Bima dengan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang pada Tanggal 26 Maret 2018.
- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima adalah Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Bima Melalui Penggunaan Produk Layanan PT. Bank NTB.

- d. Nama Kegiatan
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dalam hal Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Bima Melalui Penggunaan Produk Layanan PT. Bank NTB.
- e. SKPD Penyelenggara
Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Bima dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima ini diselenggarakan selama 1 Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima diharapkan mengoptimalkan Layanan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Bima Melalui Penggunaan Produk Layanan PT. Bank NTB.
- j. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dari Kerjasama ini adalah masih banyak Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya melakukan pembayaran secara non tunai melalui penggunaan produk layanan PT. Bank NTB.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif lagi terhadap penggunaan produk layanan PT. Bank NTB ini.

6.2.8. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/73/PK/III/2018 dan Nomor : 125/PKS/CL/2018 tanggal 13 Maret 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat adalah dalam Penyelenggaraan Infrasrtuktur Air Limbah Domestik Di Kota Bima.

d. Nama Kegiatan

Penyelenggaraan Infrasrtuktur Air Limbah Domestik Di Kota Bima

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ini adalah untuk mempercepat infrastuktur air limbah domestik agar dapat meningkatkan pelayanan sanitasi kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada kerjasama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik sehingga masih admayarakat yang kurang setuju pada saat pelaksanaan kegiatan. Solusinya adalah memberikan pencerahan dengan melakukan pendekatan segara personal maupun komunal serta melaksanakan sosialisasi yang melibatkan para tooh agama maupun tokoh masyarakat.

6.2.9. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE) Bima

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE) Bima.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/91/PK/IV/2018 dan Nomor : 124/STIE/-B/LP2M/2018 tanggal 2 April 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE) Bima dalam hal Peningkatan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Melalui Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Bima.

d. Nama Kegiatan

Peningkatan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Melalui Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Bima.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

i. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima adalah dengan adanya Peningkatan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Melalui Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Bima dapat mensejahterakan masyarakat Kota Bima.

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima adalah masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia Kota Bima dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah serta masih kurangnya modal dalam mengembangkan usaha .

Solusinya adalah Pemerintah Kota Bima adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Kota Bima sehingga mampu berdaya saing serta memberikan modal usaha dalam bentuk Kube (Kelompok Usaha Bersama).

6.2.10. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Karya Nusa Tenggara.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/137/PK/V/2018 dan Nomor : 1.AG/KNT.B/V/BM/2018 tanggal 30 Mei 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara dalam hal Pengelolaan Rumah Potong Hewan Asakota Kota Bima – Nusa Tenggara Barat .

d. Nama Kegiatan

Pengelolaan Rumah Potong Hewan Asakota Kota Bima – Nusa Tenggara Barat.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Dinas Pertanian Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

j. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada Dinas Pertanian Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama in dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Karya Nusa Tenggara ini adalah :

- Sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang industry peternakan di wilayah Kota Bima.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ternak khususnya dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima pada umumnya

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara adalah masih kurang antusiasnya masyarakat Kota Bima untuk memotong hewan pada Rumah Potong Hewan (RPH), hal ini disebabkan karena kurangnya informasi baik harga/biaya maupun kualitas dan higienitas pemotongan di RPH

Solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kegunaan dan manfaat memotong hewan di RPH.

6.2.11. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT Karya Nusa Tenggara ini hampir sama dengan Pejanjian Kerjasama Nomor : 138/137/PK/V/2018 dan Nomor : 1.AG/KNT.B/V/BM/2018 tanggal 30 Mei 2018, hanya pada Perjanjian Kerjasama ini lebih rinci dijelaskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama ini.

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Karya Nusa Tenggara.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/138/PK/V/2018 dan Nomor : 2.AG/KNT.B/V/BM/2018 tanggal 30 Mei 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara dalam hal Pengelolaan Rumah Potong Hewan Asakota Kota Bima – Nusa Tenggara Barat .

d. Nama Kegiatan

Pengelolaan Rumah Potong Hewan Asakota Kota Bima – Nusa Tenggara Barat.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Dinas Pertanian Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

k. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada Dinas Pertanian Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Karya Nusa Tenggara ini adalah :

- Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dalam pengoperasian serta pemanfaatan Rumah Potong Hewan di Asakota Kota Bima
- Meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Karya Nusa Tenggara adalah masih kurang antusiasnya masyarakat Kota Bima untuk memotong hewan pada Rumah Potong Hewan (RPH), hal ini disebabkan karena kurangnya informasi baik harga/biaya maupun kualitas dan higienitas pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan Asakota Kota Bima.

Solusinya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kegunaan dan manfaat memotong hewan di Rumah Pemotongan Hewan Asakota Kota Bima.

6.2.12. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/149/PK/VI/2018 dan Nomor : 11.Br. BMU/0270/2018 tanggal 6 Juni 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima.

d. Nama Kegiatan

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

l. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima adalah terjalannya kerjasama yang baik dalam bidang perbankan antara Pemerintah Kota Bima sebagai pemilik Uang Daerah dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bima sebagai salah satu Bank yang ada di Kota Bima dalam bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

j. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

6.2.13. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bima

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bima.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/150/PK/VI/2018 dan Nomor : B.1022/KQ-XI/LYI/07/2018 tanggal 6 Juni 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bima.

d. Nama Kegiatan

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai

yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bima adalah terjalannya kerjasama yang baik dalam bidang perbankan antara Pemerintah Kota Bima sebagai pemilik Uang Daerah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bima sebagai salah satu Bank yang ada di Kota Bima dalam bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

j. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

6.2.13. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/151/PK/VI/2018 dan Nomor : BMA/A/265/R/2018 tanggal 6 Juni 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima.

d. Nama Kegiatan

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

g. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima adalah terjalannya kerjasama yang baik dalam bidang perbankan antara Pemerintah Kota Bima sebagai pemilik Uang Daerah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima sebagai salah satu Bank yang ada di Kota Bima dalam bentuk Deposito Berjangka Tahun Anggaran 2018.

j. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

6.2.14. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/169/PK/VII/2018 dan Nomor : BMA/02/154/2018 tanggal 16 Juli 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima.

d. Nama Kegiatan

Sewa Ruang ATM Kantor Walikota Bima.

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, Bagian Umum Setda Kota Bima dan OPD terkait lainnya.

h. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dan seluruh pegawai pada OPD terkait lainnya.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 16 Juli 2018 dan akan berakhir tanggal 15 Juli 2021.

i. Hasil Kerjasama

Hasil kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima adalah dengan adanya Sera Ruang ATM pada Kantor Walikota Bima ini memberikan pelayanan yang optimal bagi pegawai dan masyarakat sekitar Kantor Walikota Bima.

j. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada masalah yang berarti selama pelaksanaan kerjasama ini. Hanya saja perlu di cek secara rutin agar cepat diketahui jika ada kerusakan pada mesin ATM tersebut.

6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

Sesuai dengan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh instansi vertikal, dimana pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan.

Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Bima selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam bentuk koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat dan forum koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bima melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari instansi vertikal agar pelaksanaannya di daerah tidak saling tumpang tindih dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Koordinasi yang dilakukan tersebut adalah dengan berbagai kantor pusat yang ada di daerah antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lain-lain.

Bentuk koordinasi lain antara Pemerintah Kota Bima dengan instansi vertikal antara lain melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang didalamnya melibatkan Pemerintah Kota Bima, DPRD Kota Bima, Kepolisian Resort Bima Kota, Kodim 1608, Kejaksaan Negeri Raba Bima. Melalui FKPD ini dibahas berbagai agenda dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan ketertiban dan ketentraman umum termasukantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, sehingga hal-hal tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin untuk mewujudkan Kota Bima yang aman.

6.3.1. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 180/317/PK/XI/2018, Nomor : R.201/K/2018 dan Nomor : B/1176/XI/2018/RES BIMA KOTA yang ditandatangani oleh Walikota Bima, dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bima dan Kepala Kepolisian Resor Bima Kota pada Tanggal 7 November 2018.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota adalah Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam

Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d. Nama Kegiatan

Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

e. SKPD Penyelenggara

SKPD yang menyelenggarakan kerjasama ini adalah Inspektorat Kota Bima, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima dan OPD terkait.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Inspektorat Kota Bima, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.

h. Jangka Waktu kerjasama

Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima antara Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota ini diselenggarakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

i. Hasil Kerjasama

Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Kejaksaan Negeri Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama diantara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

j. Permasalahan dan Solusi

Selama perjanjian ini dilaksanakan belum ada permasalahan yang berarti.

6.3.2. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Nomor : 180/333/PK/XI/2018 dan Nomor : B/971/XI/Ka/su.07/2018/BNNK-BIMA yang ditandatangani oleh Walikota Bima dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima pada Tanggal 23 November 2018.
- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima adalah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Bima.
- d. Nama Kegiatan
Kerjasama dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Bima.
- e. SKPD Penyelenggara
SKPD yang menyelenggarakan kerjasama ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima dan OPD terkait.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima ditambah dengan pegawai pada OPD terkait.
- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN dan APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2020.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima ini dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan gelap narkotika di wilayah Kota Bima.

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah penyalahgunaan narkotika yang hamper menyeluruh baik di dunia pendidikan, instansi pemerintah maupun lingkungan swasta.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi secara intensif dampak dari narkotika, melakukan tes urine pada pegawai lingkup instansi pemerintah maupun swasta, pembentukan regulasi disetiap internal instansi dan membentuk satgas anti narkoba di setiap instansi.

6.3.3. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima

Kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun dari tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2017.

a. Mitra yang Diajak Kerjasama

Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bima dalam hal Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Dasar Hukum

Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/304/PK/X/2017 dan Nomor : B2627/P.2.14/Gs.1/10/2017 yang ditandatangani Walikota Bima dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bima, pada Tanggal 3 Oktober 2017.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima adalah Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

d. Nama Kegiatan

Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

e. SKPD Penyelenggara

Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima.

f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan

Dalam rangka menyelenggarakan program/ kegiatan kerjasama, Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima ditambah dengan pegawai pada SKPD terkait.

- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dan Kejaksaan Negeri Bima ini diselenggarakan setiap tahun.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Kejaksaan Negeri Bima diharapkan Pemerintah Kota Bima mendapatkan pelayanan dalam masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
- j. Permasalahan dan Solusi
Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui Kejaksaan Negeri Bima dapat berjalan dengan baik.

6.3.4. Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kepolisian Resort Bima Kota

Kerjasama ini masih berlaku pada tahun 2018 karena jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun dari tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 10 September 2017

- a. Mitra yang Diajak Kerjasama
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resort Bima Kota dalam hal Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di Kota Bima.
- b. Dasar Hukum
Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 180/143/PK/IX/2017 dan Nomor : B/1095/IX/2016/ResBimaKota yang ditandatangani oleh Walikota Bima dengan Kapolres Bima Kota pada Tanggal 10 September 2017.
- c. Bidang Kerjasama
Bidang kerja sebagai item kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan Kepolisian Resort Bima Kota adalah Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di Kota Bima.
- d. Nama Kegiatan
Pemerintah Kota Bima melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resort Bima Kota dalam hal Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di Kota Bima.
- e. SKPD Penyelenggara
Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan kerjasama ini melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bima.
- f. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Dalam rangka menyelenggarakan program/kegiatan kerjasama,

Pemerintah Kota Bima ditunjang dengan ketersediaan pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bima.

- g. Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBD Kota Bima.
- h. Jangka Waktu kerjasama
Kerjasama antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bima dan Kepolisian Resort Bima Kota ini diselenggarakan selama 1 Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- i. Hasil Kerjasama
Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan Kepolisian Resort Bima Kota diharapkan dapat mempercepat Pengembangan Kota Cerdas (Smart City).
- j. Permasalahan dan Solusi
Kerjasama Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bima dengan Kepolisian Resort Bima Kota dapat berjalan dengan baik.

6.4. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengelola wilayahnya, maka kejelasan batas wilayah administrasi suatu daerah mempunyai nilai yang sangat strategis. Batas daerah menjadi sangat penting manakala daerah mempunyai wilayah yang berpotensi, baik potensi sumber alam, potensi pariwisata, dan potensi lainnya. Potensi tersebut akan menjadi bermasalah apabila berada pada lokasi yang batasnya belum jelas.

Pembinaan batas wilayah dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa batas wilayah antara Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Pembinaan batas wilayah juga dilakukan pada Kelurahan yang berada di wilayah kota Bima yang masih menggunakan batas alam (pohon, sungai, jalan, dan gunung) sebagai batasnya karena batas akan berubah atau hilang oleh alam itu sendiri misalnya gempa atau oleh perilaku manusia yang tidak terpuji dengan cara merusak alam untuk kepentingan sendiri.

Pada awalnya Kota Bima hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 25 Kelurahan dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 38 Kelurahan. Pemekaran wilayah ini telah ditetapkan dengan beberapa perda tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan, di mana peta batas wilayah hasil pemekaran merupakan lampiran perda tersebut. Dalam rangka pembinaan batas wilayah, khususnya batas wilayah kecamatan dan kelurahan, pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Wilayah sebanyak 5 peraturan

daerah, sedangkan pada tahun 2017 ada 3 Perda yang ditetapkan tentang pemekaran wilayah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan Jatibaru Timur, Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan Ule dan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan Oimbo, sehingga total kelurahan menjadi 41 kelurahan.

6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Sepanjang tahun 2018 di Kota Bima telah terjadi beberapa bencana antara lain: yaitu kebakaran, banjir, angin kencang, tanah longor, gempa bumi dan bencana sosial (perkelahian antar kampung), sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Rekapitulasi Kejadian Bencana & Penanggulangannya di Kota Bima Tahun 2018

No	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	SKPD yang Menangani	Status Bencana	Lembaga Penanganan Bencana
1.	4 Januari 2018	Longsor Tunggal Lingkungan	Penanae	1 Lokasi	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
2.	8 Januari 2018	Kebakaran	RT.05 RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat	1 unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
3.	13 Januari 2018	Longsor Tunggal Lingkungan	RT. 04 RW. 02 Kel. Ntobo Kec. Raba	3 unit Rumah Rusak	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
4.	14 Januari 2018	Kebakaran	RUKO Bonny Jln. Soekarno-Hatta Kel. Paruga	1 unit RUKO	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
5.	21 Januari 2018	Banjir	Dodu, Lampe Paruga, Dara, Rontu RT.01	117 Rumah terendam (Paruga RT.08, 09, 10, 75 KK, Dara 30 KK, Rontu 12 KK)	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
6.	22 Januari 2018	Longsor	Kel. Mande dan Lampe	Tanggul dan Tebing Rusak	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
7.	22 Januari 2018	Banjir	RT.09 Kel. Paruga	1 Lokasi	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
8.	23 Januari 2018	Longsor	Kel. Lampe	Tanggul dan Tebing Rusak	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan
9.	25 Januari 2018	Banjir	Kel. Panggi, Kel. Sambinae, Kel. Dara	1 unit Rumah terendam lumpur di sambinae, 1 unit pagar roboh di Niu dara, dan 2 Ruas jalan	BPBD	Bencana Lokal	BPBD, Dinas Sosial dan Kecamatan

No	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	SKPD yang Menangan i	Status Bencana	Lembaga Penangan an Bencana
				terendam lumpur yaitu jln lintas panggi ±70 m dan jln Negara Depan PLTD Niu ± 120 m			
10.	27 Januari 2018	Longsor	Kel. Rontu dan Kel. Rabadompu Barat	Tanggul dan Tebing Rusak	BPBD	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial dan Kecamatan
11.	29 Januari 2018	Angin Kencang	Pohon tumbang di 5 Titik; Tolotongga, SLB, DPRD, Taman Ria menimpa pengendara motor	Meninggal : 1 org, 4 org Luka-luka	BPBD	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial dan Kecamatan
			RT. 11, 12 RW. 04 Kel. Ntobo Kec. Raba, RT. 18, 21 RW. 07 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota dan di RT.03 RW.01 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat	6 Unit Rumah Rusak	BPBD	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial dan Kecamatan
12.	31 Januari 2018	Gempa Bumi	Gempa I. Jam 08.55;35 7,88 LS 118,8 BT Kedalam 30 km/ 60km timur laut Kota Bima. Gempa II; Jam 10.03 Wit 7,88 LS 118,81 BT kedalaman 26 km.		BPBD	Bencana Regional / Provinsi	BPBD
13.	2 Maret 2018	Banjir	Kel. Dodu	5 unit rumah terendam	BPBD	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial dan Kecamatan
14.	3 Maret 2018	Kebakaran	RT. 03 RW. 01 Kamp. Benteng, Kel. Melayu, Kec. Asakota	1 unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol PP dan Kecamatan
15.	3 April 2018	Kebakaran	RT. 12 RW. 04 Binabaru, Kel. Dara, Kec. Asakkota	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial,Pol. PP dan Kecamatan
16.	5 April 2018	Kebakaran	RT. 08 RW. 03 Bedi, Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
17.	23 April 2018	Kebakaran	RT. 04 RW. 02 Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
18.	18 Mei 2018	Kebakaran	RT. 17 RW. 08 Sanggopa, Kel. Kolo, Kec. Asakota	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan

No	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban	SKPD yang Menangan i	Status Bencana	Lembaga Penangan an Bencana
19.	27 Mei 2018	Kebakaran	RT. 17 RW. 08 Sanggopa, Kel. Kolo, Kec. Asakota	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
20.	29 Mei 2018	Gempa Bumi	9.29 LS 118.42 BT 84 Barat Laut Sumba Barat Daya, 5,6SR. Kedalaman 10 Km		BPBD	Bencana Lokal	
21.	30 Mei 2018	Gempa Bumi	RT. 13 RW. 05 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur		BPBD	Bencana Lokal	
22.	7 Juni 2018	Kebakaran	RT. 03 RW. 01 Kel. Rabadompu Timur Kec. Raba	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
23.	17 Juni 2018	Kebakaran	RT. 03 RW. 01 Lingk Nggarolo Kel. Penaraga Kec. Raba	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
24.	23 Juni 2018	Kebakaran	Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat	1 unit rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
25.	27 Juni 2018	Gempa Bumi	8.06 LS 117.81 BT 79 Km Barat Laut Dompnu NTB Kedalaman 10 Km Daya 5.0 SR		BPBD	Regional /Provins i	
26.	9 Juli 2018	Kebakaran	Sebelah Barat RM. Arema Kec. Mpunda	1 Unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
27.	11 Juli 2018	Kebakaran	Rt. 05, Rw. 02 Kel. Jatiwangi Kec. Asakota	1 Unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
28.	13 Juli 2018	Kebakaran	Depan Masjid Uswatun Khasanah Kel. Melayu	1 Unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol.PP dan Kecamatan
29.	8 Agustus 2018	Kebakaran	RT. 08 RW. 04 Kel. Rontu Kec. Raba	1 Unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan
30.	13 Oktober 2018	Kebakaran	RT. 04 RW. 03 Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat	1 Unit Rumah Warga	BPBD dan Sat Pol PP	Bencana Lokal	BPBD,Dina s Sosial, Pol. PP dan Kecamatan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, 2018

Bantuan yang diberikan dalam penanganan terhadap dampak bencana dapat dilihat pada table berikut

Tabel 6.2. Bantuan Terhadap Dampak Bencana di Kota Bima Tahun 2018

No	Jenis Bencana	Lokasi/Kecamatan/ Kelurahan	Kategori Kerusakan			Perkiraan Nilai Kerugian (Rp.)	Realisasi Bantuan (R)
			Ringan	Sedang	Berat		
1	Banjir	Kel. Dodu, Lampe, Paruga, Dara dan Rontu			√	Rp. 150.000.000	
		Kel. Paruga		√		Rp. 25.000.000	
		Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Dara		√		Rp. 25.000.000	
		Kelurahan Dodu	√			Rp. 15.000.000	Peralatan dapur, famili kit dan selimut
		Kelurahan Paruga	√			Rp. 15.000.000	
		Kelurahan Sambinae, Dara					
		Kelurahan Panggi					
2	Kebakaran	Kelurahan Nae Kec. Rasanae Barat	√			Rp. 15.000.000	
		Ruko Bony Jln Soekarno Hatta Paruga	√			Rp. 15.000.000	
		Kampung Benteng Kelurahan Malayu Kec. Asakota			√	Rp.45.000.000	
		Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat	√			Rp. 3.500.000	
		Kelurahan Mangge Maci Kec. Mpunda					
		Kel. Pane Kec. Rasanae Barat			√	Rp 50.000.000	
		Kel Kolo Kec. Asakota		√		Rp.35.000.000	Bantuan tanggap darurat berupa peralatan dapur, family kit, tikar, selimut dan ember
		Kel Kolo Kec. Asakota	√			Rp. 15.000.000	Bantuan tanggap darurat berupa peralatan dapur, family kit, selimut, tikar dan ember
	Kel. Rabadompui Timur Kec. Raba	√			Rp 10.000.000	Bantuan tanggap darurat berupa Peralatan dapur, family kit, tikar, selimut, ember dan terpal	
	Lingk. Nggaro Lo Penanae		√		Rp.25.000.000	Bantuan tanggap darurat	

No	Jenis Bencana	Lokasi/Kecamatan/ Kelurahan	Kategori Kerusakan			Perkiraan Nilai Kerugian (Rp.)	Realisasi Bantuan (R)
			Ringan	Sedang	Berat		
							berupa peralatan dapur, family kit, selimut, tikar dan embe
		Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat					
		Sebelah Barat RM. Arema Santi	√			Rp 10.000.000	
		Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota					
		Depan Mesjid Uswatun Khasanah Kel. Melayu	√			Rp 10.000.000	
		Kel. Rontu Kec. Raba	√			Rp 10.000.000	Bantuan tanggap darurat berupa peralatan dapur, family kit, selimut, tikar dan ember
		Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat			√	Rp. 375.000.000	Selimut 13 lembar, family kit 12 paket, kids ware 2 paket dan ember 12 buah
3	Angin Kencang	Tolotonga, SLB, DPR, Taman Ria	√			Rp. 10.000.000	
		Kelurahan Jatiwangi kec. Asakota dan Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat					
4	Longsor	Kel. Penanae	√			Rp. 5.000.000	
		Kel. Ntobo Kec. Raba			√	Rp. 150.000.000	Peralatan dapur 5 paket, sandang 5 paket, makanan siap saji 2 paket, lauk pauk 1 paket, tambahan gizi 1 paket, sari mie 2 dos, selimut 5 buah dan jirigen 10 buah
		Kel. Mande dan Kel. Lampe		√		Rp. 35.000.000	
		Kel. Lampe		√		Rp. 35.000.000	
		Kel. Rontu dan Rabadompu Barat					
5	Gempa Bumi	Timur Laut Kota Bima					

No	Jenis Bencana	Lokasi/Kecamatan/ Kelurahan	Kategori Kerusakan			Perkiraan Nilai Kerugian (Rp.)	Realisasi Bantuan (R)
			Ringan	Sedang	Berat		
		Sumba Barat Daya					
		Kelurahan Dodu Kec. Rasanae Timur					
		Barat Laut Dompu NTB					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, 2018

6.5.2. Status Bencana

Sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Bima selama Tahun 2018 dikategorikan sebagai bencana lokal atau bencana kab/kota

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan untuk menangani bencana yang terjadi di Kota Bima bersumber dari APBD Kota Bima. Penggunaan anggaran tersebut dianggarkan pada BPBD sebesar Rp 56.203.648.160,- Terealisasi sebesar Rp. 28.626.002.256.36,- atau 50,93%. Anggaran penanggulangan bencana pada tahun 2018 ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2018 karena adanya anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir yang terjadi pada akhir tahun 2017 lalu. Persentase realisasi anggaran yang minim ini terjadi karena ada kegiatan pembangunan perumahan masyarakat korban banjir yang belum terealisasi karena adanya kendala pada pengadaan lahan yang belum siap.

6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2009, Tanggal 3 Juni 2009 dan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:061/2355/SJ, Tanggal 1 Juli 2009. Pemerintah Kota Bima membentuk Badan Khusus yang menangani bencana yaitu Badan Penanganan dan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, dimana Badan ini senantiasa siaga dan pro Aktif untuk mengantisipasi/ menganggulangi terjadinya bencana di Kota Bima.

Dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi, berbagai upaya telah dilakukan, yaitu :

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- Menyelenggarakan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat di kawasan Rawan bencana Banjir maupun Tanah longsor;
- Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Evakuasi Penanggulangan bencana terhadap Masyarakat di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor;
- Penyediaan Logistik dalam kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

- Mensiagakan Petugas Penanggulangan bencana baik Aparatur, TSKB, serta Organisasi Perangkat Daerah dan TNI/Polri.
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Bima;
- Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
- Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana;
- Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Kota Bima. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Kota Bima;
- Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Kota Bima, khususnya di daerah rawan bencana.
- Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor secara khusus.
- Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat.
- Memaksimalkan koordinasi dan ketertiban antara instansi yang terkait dengan melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan per triwulan dan pada kondisi – kondisi yang mendesak;
- Memaksimalkan dukungan sejumlah organisasi non pemerintah (Non Government Organization) dalam hal capacity building penanggulangan bencana di Kota Bima.

6.5.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Penanganan bencana memerlukan koordinasi lintas sektor. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana di Kota Bima adalah Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima serta. Sedangkan penanganan pasca bencana melibatkan berbagai OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD. Dalam pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran yang ada ada pada Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 18

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, yang menangani unit pemadam kebakaran menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

6.5.6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Melihat kondisi geografis dan keadaan alam Kota Bima serta berdasarkan peristiwa bencana yang pernah terjadi, maka potensi bencana yang diperkirakan terjadi di masa akan datang antara lain :

a. Banjir bandang

Bencana banjir bandang dimungkinkan terjadi melihat bentang alam Kota Bima yang dapat dikategorikan wilayah dataran rendah menyerupai 'lembah' dan dikelilingi oleh bukit. Kemungkinan ini ditambah dengan adanya aktivitas pengrusakan hutan lindung di wilayah hulu, sehingga bila musim penghujan tiba dan dengan intensitas turunnya hujan yang sering, maka dimungkinkan Kota Bima menerima 'banjir kiriman' sedangkan sungai-sungai yang ada tidak mampu menampungnya. Daerah rawan banjir ini makin diperburuk dengan adanya penggundulan hutan atau perubahan tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air. Perubahan tata guna lahan dan tataruang yang kemudian berakibat menimbulkan banjir

b. Gempa bumi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Indonesia merupakan daerah yang dilalui jalur gempa. Gempa merupakan peristiwa alam, terjadi secara mendadak, timbul karena adanya pelepasan energi, sebagai akibat pergeseran relatif batuan/lempeng tektonik/kerak bumi, yang dalam banyak kasus menimbulkan banyak kerugian harta benda, bahkan korban manusia. Di Kota Bima, potensi terjadinya gempa bumi cukup besar sehingga harus selalu diwaspadai.

c. Angin kencang

Benih badai tropis yang sering terjadi di kawasan perairan Nusa Tenggara akibat faktor pergerakan angin, berpotensi pula menimbulkan angin kencang di wilayah Kota Bima.

d. Kebakaran

Hal yang juga perlu diwaspadai adalah kebakaran yang juga dapat berpotensi terjadi ketika musim kemarau melanda, dimana teriknya panas matahari dapat memicu timbulnya api, disamping juga akibat kelalaian masyarakat.

e. Longsor

Kondisi topografis Kota Bima yang berbukit dengan kelerengan yang curam mempunyai potensi terjadinya bahaya Longsor. Kondisi tersebut ditambah berkurangnya tutupan lahan akibat kerusakan hutan dan aktifitas penambangan bahan galian dapat memicu potensi Longsor.

f. Bencana Sosial (Kerusuhan Massa)

Hal yang juga perlu diwaspadai adalah maraknya aksi demonstrasi yang mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kota Bima, tidak sedikit yang mengarah pada tindakan anarkisme sehingga seringkali menimbulkan kerusuhan, pengrusakan, dan penganiayaan yang sebagian besar berhadapan dengan fasilitas Pemerintah dan sudah pasti akan banyak menimbulkan kerugian.

6.6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum kepada masyarakat. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

6.6.1. Gangguan yang Terjadi

Selama tahun 2018 di Kota Bima tidak terjadi gangguan yang berarti dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti konflik yang berbasis SARA, anarkisme dan separatisme.

Kejadian yang mengarah pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum antara lain :

Tabel 6.3.Kejadian Pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Bima Tahun 2018

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
1	26 Februari 2018	Kantor BRI Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh LPPK	Pelayanan Publik BRI yang kurang transparan dan berbelit-belit.	Negoisasi dengan pimpinan BRI di fasilitasi Kepolisian
2	05 Maret 2018	Kantor DPRD Kota Bima	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh PMII	Penolakan Undang-Undang MD3	Di terima oleh beberapa anggota DPRD
3	05 Maret 2018	Depan Kampus STKIP Bima	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh PMII	Titik Kumpul Demo Penolakan Undang-Undang MD3	
4	17 Maret 2018	Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur	Perkelahian antar warga	Cek-Cok Mulut pada saat Orgen tunggal	Mendamaikan kedua belah pihak
5	1 April 2018	Jembatan Cinta Kel. Dara Kec. Rasanae Barat	Perkelahian antara Kamp. Sigi dan Kamp. Dara menggunakan Panah	kejadian akibat minuman miras atas nama Fandi dkk warga kel. Paruga melempar rumah sdr Bambang, akhirnya terjadi pelemparan dengan batu dan panah.	
6	2 April 2018	Kel. Rabanggodu Kec. Raba	Kegiatan audiensi di kantor Dinas Koperidag	Acara audiensi terkait adanya pungli yang dilakukan oleh Dinas Koperidag terhadap para	

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
				pedagang di Pasar Amahami	
7	17 April 2018	Paruga Na'e Convention Hall	Telah terjadi Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode tahun 2018-2023	
8	1 Mei 2018	Kel. Sadia Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/ unjuk rasa oleh Organisasi Komite Perjuangan Rakyat (KPR)	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia	
9	2 Mei 2018	Kantor DPRD Kab. Bima, Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh BEM STIE Bima	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia	
10	2 Mei 2018	Perempatan Gunung Dua Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh BEM STIE Bima	Unjuk Rasa memperingati Hari Buruh Sedunia	
11	5 Mei 2018	Kel. Monggonao Kec. Mpunda	Telah terjadi Penangkapan Curanmor	Tim OPSNAL (TIM KIA MBOJO) RES BIMA KOTA melakukan Penangkapan pelaku Curanmor berdasarkan laporan polisi nomor : LP/K/165/V/2018/NTB/ RES BIMA KOTA	
12	6 Mei 2018	Kel. Rabadompu Timur Kec. Raba	Telah terjadi Pengerusakan kediaman sdr. MUSTAMIN	Pelaku Pengerusakan dilakukan oleh beberapa anggota Keluarga sdr. BETI yang diduga menjadi korban pencabulan oleh sdr. MUSTAMIN	
13	7 Mei 2018	SPKT Polres Bima Kota	Pelaporan Oleh Calon Walikota Bima No. Urut 2	Pelaporan dilakukan oleh H.M. LUTFI, SE terkait kasus Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Penghinaan yang dilakukan oleh sdr. RUSLAN H. Usman	
14	8 Mei 2018	Paruga Na'e Convention Hall	Telah terjadi Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Periode tahun 2018-2023	
15	14 Mei 2018	Depan Kampus STKIP Bima	Telah terjadi demo/unjuk rasa oleh SMI Cabang Bima	Unjuk Rasa terkait dengan menyampaikan aspirasi dalam melawan kapitalisasi pendidikan dan wujudkan	

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
				demokratisasi kampus	
16	20 Mei 2018	Cabang Empat lampu merah, Kompleks Plaza Pasar Raya Bima Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Terjadi Penggalangan Dana oleh Me-Dan dan JAS Bima	Berlangsung aksi Solidaritas Penggalangan Dana untuk Palestina oleh Forum Medis dan Aksi Kemenangan Indonesia Bersama (Me-Dan) bergabung oleh JAS Bima	
17	8 Juni 2018	Kel. Kodo Kec. Rasanae Timur	Telah terjadi Pembacokan	Telah terjadi tindak kriminal Pembacokan yang dilakukan oleh sdr. Hairul terhadap H. Rusli yang menyebabkan tangan bagian kanan terkena senjata tajam	
18	11 Juni 2018	Pos Pengaman Serasuba Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat	Telah terjadi Operasi Kewilayahan dengan sandi KETUPAT GATARING 2018	Telah terjadi Operasi Kewilayahan dengan sandi KETUPAT GATARING 2018 selama 16 hari mulai tanggal 8-23 Juni 2018 dalam rangka ketertiban pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H	
19	2 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS	
20	4 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di tiap-tiap TPS yang bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi KPUD Kota Bima di	

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
				aula KPUD Kota Bima	
21	5 Juli 2018	Kantor KPUD Kota Bima dan Kantor Panwaslu Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa simpatisan Paslon No. Urut 1 (H. Arahman H. Abidin-Hj Fera Amelia) terkait dengan menyikapi adanya dugaan kecurangan/pelanggaran pada proses pemungutan suara pilkada Kota Bima 2018	
22	22 Juli 2018	Jembatan Padolo 1 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat	Aksi Unjuk Rasa Oleh Masyarakat Kel. Dara	Aksi Unjuk Rasa Oleh Masyarakat Kel. Dara terkait dengan pembangunan Jembatan Padolo 1 Kota Bima untuk di hentikan sementara karena tidak ada sosialisasi pihak proyek kepada keluarga sekitar jembatan tentang seberapa tinggi, lebar dan panjang jembatan serta papan gambar/denah proyek jembatan	
23	11 Juli 2018	Kantor BRI Cabang Bima Lingk. Serasuba kel. Sarae Kec. Rasanae Barat	Aksi Unjuk Rasa dari LPPK (Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi)	Aksi Unjuk Rasa dari LPPK (Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi) sebanyak 15 orang terkait adanya nasabah atas nama sdr. ARMAN yang diduga dibobol uang tabungan sebanyak Rp. 80.000.000 oleh oknum BRI	
24	20 Juli 2018	Bandara Sultan Muhammad Salahudin Desa Belo Kec. Palibelo	Penjemputan Jenazah Teroris	Telah terjadi Penjemputan diduga Jenazah Teroris atas nama Yasser warga Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima	
25	23 Juli 2018	Depan kantor DPRD Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa oleh masa sebanyak 3 orang	Aksi Unjuk Rasa oleh masa sebanyak 3 orang terkait dengan hilangnya uang nasabah BRI	

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
25	24 September 2018	Perempatan Gunung Dua	Aksi Unjuk Rasa dari Organisasi Aliansi Mahasiswa peduli Tani	Aksi unjuk rasa dari Organisasi Aliansi Mahasiswa peduli Tani yang menuntut kesejahteraan petani dengan menaikkan harga bawang, menurunkan harga pupuk dan obat-obat pertanian, pengontrolan terhadap harga pupuk dan mengatur standar harga minimum hasil pertanian.	
26	24 September 2018	Kantor DPRD Kab. Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Rakyat peduli Tani Kec. Soromandi	Mendesak pemerintah agar menghentikan import bawang merah, standar harga pupuk subsidi dan non subsidi, dan menentukan standar harga obat-obat pertanian	
27	1 Oktober 2018	Kantor DPRD Kota Bima Kel. Rabangodu Kec. Raba	Aksi Demontrasi dari Bem STISIP Bima	aksi demonstrasi dari Bem stisip bima terkait dengan ujaran penghinaan melalui media sosial oleh oknum Anggota Dewan	
28	26 Oktober 2018	Aula Kantor Walikota Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Pertemuan antara Walikota Bima Beserta Tokoh Agama Sekota Bima	Membahas adanya aksi pembakaran bendera tauhid di Garut Jawa Barat	
29	26 Oktober 2018	Mesjid Raya Al-Muwahidin Kel. Sarae Kec. Rasanae Barat	Aksi Damai sekitar 1000 Orang dari Ormas Islam Sekota dan Kab. Bima	Aksi Damai dengan cara berkonvoi keliling seputaran jalanan Kota Bima menuju Kantor PC NU Bima dan Polres Bima Kota terkait meyakini adanya tindakan dari Oknum Banser yang melakukan pembakaran bendera Tauhid di Garut Jawa Barat	
30	30 Oktober 2018	Kantor DPRD Kota Bima Kel. Rabangodu Kec. Raba	Aksi Unjuk Rasa sekitar 600 orang dari Forum Honorer Indonesia (K2) Kota Bima	Desakan pengangkatan untuk diakomodir menjadi CPNS tanpa batas usia dan tes, segera lakukan uji publik data K2 Kota Bima, meminta dukungan moril dan finansial dari Bapak Walikota Bima	

No	Waktu Kejadian	Lokasi/Pihak Yang Terlibat	Jenis Gangguan	Faktor Penyebab	Upaya Penanganan
31	31 Oktober 2018	KM Kartika Express	Kebakaran sebuah Kapal Barang KM Kartika Express milik H. Nasir (60 Tahun) dengan alamat Kec. Sape di Pelabuhan I Kota Bima	Penyebab kebakaran yaitu adanya asap dan api yang berasal dari dek bawah bagian belakang kapal	
32	5 November 2018	Kantor Walikota Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh sekitar 40 orang Mahasiswa dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Penggugat (LMND Lsip IMS Imawer)	Masalah pendidikan ekonomi dan penegakan supremasi hukum (pendidikan gratis perpustakaan berjalan, menghentikan tindakan represif terhadap gerakan Mahasiswa, seret dan adili pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan, dan pemberdayaan pemuda)	
33	9 November 2018	Kendo Kel. Kendo Kec. Raba	Ditemukan Mayat seorang laki-laki yang bernama Wawan Setiawan yang diduga menjadi korban pembunuhan	Perkelahian dan dendam lama antara Korban dan Pelaku	
34	19 November 2018	Kantor Dinas pertanian Kota Bima	Aksi Unjuk Rasa dilakukan oleh 13 Orang yang tergabung dalam Organisasi Lembaga Pengawas Korupsi Bima	Pembagian bibit jagung bagi kelompok tani oleh pihak Ormas GP Ansor dengan adanya penarikan biaya senilai Rp. 250.000-Rp. 400.000 pada Petani	
35	19 November 2018	Kantor DPRD Kab. Bima Kel. Penatoi Kec. Mpunda	Aksi Unjuk Rasa oleh Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) terkait memperingati hari Pelajar Nasional	Lawan kapitalisasi pendidikan, menuntut dicabutnya regulasi yang meliberalisasi sektor pendidikan Indonesia dan menolak regulasi yang menciderai demokrasi rakyat	

Di samping kejadian-kejadian unjuk rasa tersebut diatas ada beberapa kejadian gangguan sosial oleh anak jalanan, anak sekolah dan pedagang kaki lima yang penanganannya dilakukan secara persuasif oleh aparat pengamanan.

6.6.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan koordinasi dengan TNI dan POLRI.

6.6.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bima telah menganggarkan dana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.122.125.219 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 96,46%. Sedangkan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) pada tahun 2018 mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.445.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.240.247.569,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 96,82%.

6.6.4. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan yang dilakukan terhadap potensi gangguan yang terjadi antara lain :

- Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum.
- Peningkatan fungsi deteksi dini pada OPD yang berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna mengantisipasi kejadian yang akan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Peningkatan koordinasi lintas instansi dan antar tingkatan pemerintahan
- Saling berkoordinasi dengan aparat pengamanan terkait. Koordinasi diperlukan untuk menciptakan keterpaduan dalam kegiatan penanggulangan bahaya.
- Rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- Melakukan tindakan sesuai aturan/ regulasi.
- Pendekatan kekeluargaan melalui berbagai jenis kegiatan penyuluhan dan pembinaan
- Melaksanakan forum komunikasi antara umat beragama untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama mencegah konflik bernuansa agama yang mungkin timbul.

- Meningkatkan koordinasi forum antar etnis untuk mempererat rasa persaudaraan di antara berbagai kelompok etnis yang ada di Kota Bima sehingga tidak terjadi konflik yang bernuansa etnis.
- Membentuk satuan keamanan lingkungan di masyarakat untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Adapun kendala yang dihadapi, antara lain :

- Posisi strategis Kota Bima sehingga berpotensi munculnya kerawanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan.
- Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia aparatur LiNMAS.
- Semakin maraknya peredaran MIRAS dan Narkoba yang berakibat pada meningkatnya kejahatan.

6.6.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Bima perlu didukung oleh instansi terkait, Dalam hal ini Kepolisian Resort Bima Kota dan Kodim 1608 Bima. Hal tersebut dilaksanakan agar penanganan gangguan dapat ditangani secara efektif dari hulu sampai hilir, dengan memanfaatkan komponen yang ada di dalam struktur tugas Kepolisian Resort Bima Kota dan Kodim 1608 Bima.

Keikutsertaan dan partisipasi aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat antara lain :

- a. *Back up* di lapangan (tempat gangguan terjadi)
- b. Penegakan peraturan-peraturan.
- c. Saling koordinasi antar aparat keamanan
- d. Sebagai sumber data/ informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur, yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Pusat dapat memantau dan memahami tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sekaligus untuk perekat Persatuan dan Kesatuan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintah dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, koordinasi, penyempurnaan dan pengembangan.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, yang sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima dan DPRD Kota Bima untuk melaksanakan pembangunan daerah, namun masih banyak program pembangunan yang belum berjalan dengan baik. Walaupun demikian tetap diupayakan perbaikan terus-menerus setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dinikmati secara adil dan merata.

Secara umum pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota selama Tahun 2018 mencapai keberhasilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, namun disamping keberhasilan kita harus akui secara jujur masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang perlu di tuntaskan pada tahun - tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pengembangan Kota Bima ke depan dan menjadi bahan kajian Pemerintah untuk pembinaan lebih lanjut menuju daerah otonom yang semakin mandiri. Terimakasih atas segala perhatian dan partisipasi semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.